

**PERAN PEMERINTAH KALURAHAN KARANGAWEN, KAPANEWON
GIRISUBO, KABUPATEN GUNUNGKIDUL DALAM MEWUJUDKAN
DESA PRENEUR**

SKRIPSI



Disusun oleh

Prayuda

17520285

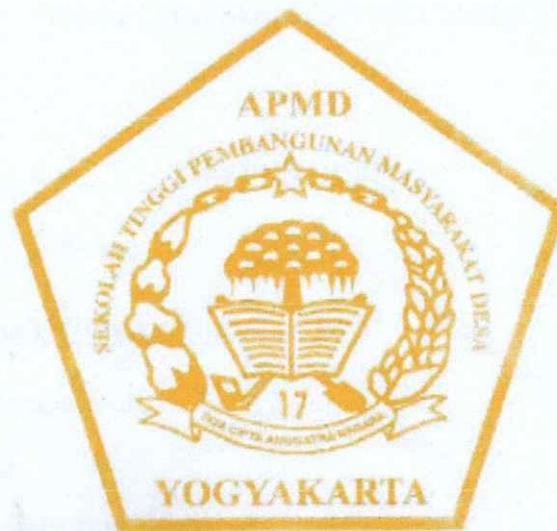
**PROGRAM STUDI ILMU PEMERINTAHAN S1
SEKOLAH TINGGI PEMBANGUNAN MASYARAKAT DESA “APMD”
YOGYAKARTA
2023**

**PERAN PEMERINTAH KALURAHAN KARANGAWEN KABUPATEN
GUNUNGGIDUL DALAM MEWUJUDKAN
DESA PRENEUR**

SKRIPSI

Diajukan Untuk Memenuhi Syarat Guna Mencapai Gelar Sarjana S-1

Program Studi Ilmu Pemerintahan



Disusun oleh:

Prayuda

17520285

**PROGRAM STUDI ILMU PEMERINTAHAN
SEKOLAH TINGGI PEMBANGUNAN MASYARAKAT DESA “APMD”**

YOGYAKARTA

2023

ii

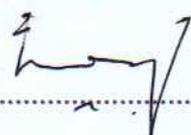


HALAMAN PENGESAHAN

Skripsi ini telah di uji dan dipertahankan di depan Tim Penguji untuk memenuhi persyaratan memperoleh gelar Sarjana (S1) Program Studi Ilmu Pemerintahan Sekolah Tinggi Pembangunan Masyarakat Desa “APMD” Yogyakarta pada:

Hari : Senin
Tanggal : 28 Agustus 2023
Waktu : 10.00-11.00 WIB
Tempat : Ruang Ujian Skripsi STPMD “APMD” Yogyakarta

TIM PENGUJI

Nama	Tanda Tangan
<u>Dra. Safitri Endah Winarti, M.Si</u> Ketua Penguji/ Pembimbing	
<u>Drs. Jaka Triwidaryanta, M.Si</u> Penguji Samping 1	
<u>Utami Sulistiana, S.P., M.P</u> Penguji Samping 2	



Mengetahui,
Ketua Program Studi Ilmu Pemerintahan

Dr. Rijel Samaloisa

HALAMAN PERNYATAAN KEASLIAN

Saya yang bertanda tangan dibawah ini:

Nama : Prayuda

NIM : 17520285

Program Studi : Ilmu Pemerintahan

Menyatakan dengan sesungguhnya bahwa skripsi yang berjudul **"Peran Pemerintah Kalurahan Karangawen, Kabupaten Gunungkidul Dalam Mewujudkan Desa Preneur"** adalah betul-betul karya saya sendiri, dan sepanjang pengetahuan saya tidak terdapat karya atau pendapat yang pernah ditulis dan diterbitkan oleh yang lain. hal-hal yang bukan karya saya dalam skripsi ini, telah disebutkan dalam teks dan dicantumkan dalam daftar pustaka.

Yogyakarta, 25 Agustus 2023
Yang Membuat Pernyataan



Prayuda
17520285

KATA PENGANTAR

Puji dan syukur kehadiran Tuhan Yang Maha Esa atas segala nikmat dan kuasanya, sehingga penulis dapat menyelesaikan penulisan skripsi ini dengan judul Peran Pemerintah Kalurahan Karangawen, Kabupaten Gunungkidul Dalam Mewujudkan Desa Preneur.

Penulisan skripsi ini tentu tidak terlepas dari dukungan dan bantuan dari berbagai pihak. Pada kesempatan ini, penulis mengucapkan terimakasih sebesar-besarnya kepada:

1. Dr. Sutoro Eko Yunanto, M.Si selaku Ketua Sekolah Tinggi Pembangunan Masyarakat Desa “APMD” Yogyakarta.
2. Dr. Rijel Samaloisa selaku Ketua Program Studi Ilmu Pemerintahan STPMD “APMD” Yogyakarta.
3. Dra. Safitri Endah Winarti, M.Si selaku Dosen Pembimbing yang telah berkenan meluangkan waktu dan tenaga dalam membimbing terhadap skripsi ini.
4. Alm. Suharyanto selaku Dosen Pembimbing terdahulu saya yang telah mendahului kami semua, semoga amal ibadah beliau diterima disisi Tuhan Yang Maha Esa.
5. Seluruh Dosen Program Studi Ilmu Pemerintahan Sekolah Tinggi Pembangunan Masyarakat Desa “APMD” Yogyakarta yang telah memberikan ilmu dan berbagai pengalamannya selama penulis mengenyam pendidikan.
6. Seluruh keluarga besar civitas akademik STPMD ‘APMD’ Yogyakarta.

7. Kepala Desa beserta jajaran, serta masyarakat Kalurahan Karangawen yang telah memberi kemudahan bagi saya dalam menyampaikan informasi terkait kebutuhan skripsi saya.
8. Seluruh penulis dalam karya ilmiahnya yang dikutip dan menjadi rujukan dalam penulisan skripsi ini.

Penulis menyadari bahwa skripsi ini masih jauh dari kata sempurna, oleh karena itu penulis mengharapkan kritik dan saran yang bersifat membangun dari semua pihak sehingga skripsi ini dapat menjadi bahan pergulatan pembentukan pengetahuan dan memberikan asas kebermanfaat bagi warga. Akhir kata penulis mengucapkan terimakasih kepada semua pihak yang telah terlibat membantu.

Yogyakarta, 25 Agustus 2023

Prayuda

NIM: 17520285

MOTTO

"Satu-Satunya Cara Untuk Bertahan Hidup Di Dunia Ini Adalah Menjadi Lebih
Pintar Dari Orang Berikutnya"

THOMAS SHELBY

"Ingat, Tidak Ada Kondisi Manusia Yang Permanen. Maka, Kamu Tidak Boleh
Terlalu Senang Dengan Nasib Baik, Atau Terlalu Bersedih Dalam Nasib Buruk"

SOCRATES

"Hidup Ini Sulit, Apa Yang Kamu Ingin Tidak Akan Selalu Kamu Dapatkan"

PRAYUDA

HALAMAN PERSEMBAHAN

Skripsi ini saya persembahkan kepada setiap orang-orang yang sudah turut ambil bagian dalam proses hidup saya baik secara materi, bimbingan, motivasi, dukungan serta selalu memberikan kekuatan sehingga saya bisa sampai pada titik ini. Adapun skripsi saya persembahkan kepada:

1. Dengan memanjatkan puji dan syukur saya persembahkan kepada Tuhan Yang Maha Esa yang telah melimpahkan rahmat dan karunia-Nya, sehingga skripsi yang saya buat ini dapat diselesaikan. Bukan perjuangan yang mudah untuk bisa sampai pada tahap ini banyak rintangan dan tantangan yang harus dilewati, sempat gagal kelas 1 SMA dan sempat pindah sekolah beberapa kali namun karena kebaikan Tuhan Dia izinkan saya untuk melanjutkan sekolah sampai saat ini.
2. Ucapan terimakasih yang sebesar-besarnya kepada kedua orang tuaku, Bapak Suloh, S.Sos. dan Ibu Veronika yang telah melahirkan dan membesarkan saya ke dunia, terimakasih sudah menjadi sosok orang tua yang baik, orang tua yang selalu ada dan mau serta mampu berjuang hingga pada hari ini. Terimakasih atas didikan kalian yang selalu mengajarkan bahwa hidup itu penuh perjuangan dan tantangan, sekiranya kedepan kalian terus Tuhan beri kesehatan serta umur yang panjang sehingga kita bisa mewujudkan mimpi yang belum tercapai.
3. Terimakasih buat ketiga saudaraku Sindy, Rivaldo , Marvin yang sudah turut memberikan dukungan moral dan material sehingga studi yang saya jalankan ini dapat diselesaikan
4. Terimakasih buat Kakek Nenek serta keluarga besar yang ada di kampung yang turut memberikan dukungan dan semangat.

5. Semua teman dan sahabat saya, Sania, Wendy, Damian, Fersa, Basel, Yogi, Galuh, Akbar, Tari, Kris, Tomi, Melki, Ezra, dan teman-teman yang lain-lain yang tidak dapat saya sebut satu persatu.

Penulis menyadari bahwa skripsi ini masih banyak kekurangan karena keterbatasan dan pengalaman yang dimiliki penulis. Oleh karena itu, penulis mengharapkan kritik dan saran yang membangun dari para pembaca guna menyempurnakan skripsi ini. Semoga skripsi ini bermanfaat dan dapat menjadi bahan masukan bagi rekan – rekan dalam menyusun skripsi.

INTISARI

Skripsi ini membahas peran Pemerintah Kalurahan Karangawen, Kapanewon Girisubo, Kabupaten Gunungkidul dalam mewujudkan desa preneur. Desa Preneur merupakan desa yang memiliki kemampuan untuk menumbuhkan unit-unit usaha skala desa, yang diusahakan oleh warga desa itu sendiri melalui penguatan pengetahuan dan keterampilan berwirausaha, peningkatan mutu produk/ jasa, nilai tambah, dan daya saing dengan tujuan untuk meningkatkan perekonomian desa dan tercapainya kesejahteraan hidup warga. Kalurahan Karangawen hanya memiliki potensi pada para pelaku UMKM yang memproduksi olahan hasil tani.

Penelitian ini menggunakan jenis penelitian eksploratif-kualitatif. Dalam penelitian ini, peneliti melakukan tiga hal untuk mengumpulkan data. Yakni observasi, wawancara mendalam, dan dokumentasi. Analisis data yang digunakan dalam penelitian ada tiga tahapan yang dilakukan oleh peneliti, yakni reduksi data, penyajian data, dan penarikan kesimpulan.

Hasil dari penelitian ini adalah Pemerintah Kalurahan Karangawen bertindak sebagai fasilitator dan hanya baru menghasilkan rintisan desa preneur di tahap 'pertumbuhan'. Kendala dalam mewujudkan desa preneur berada pada internal Pemerintah Kalurahan Karangawen sendiri, yakni kurang persiapan dan ketidakprofesionalan dengan bukti membuat struktur kelembagaan desa preneur tidak sesuai peraturan yang berlaku. Selain itu juga masih terfokus pada perolehan Kalurahan Karangawen sebagai desa budaya.

Kata kunci: Peran, Pemerintah Kalurahan, Desa Preneur.

DAFTAR ISI

HALAMAN PENGESAHAN	iii
HALAMAN PERNYATAAN KEASLIAN	iv
KATA PENGANTAR	v
MOTTO	vii
HALAMAN PERSEMBAHAN	viii
INTISARI	x
DAFTAR ISI	xi
DAFTAR TABEL	xiii
DAFTAR GAMBAR	xiv
BAB I PENDAHULUAN	1
A. Latar Belakang Masalah.....	1
B. Rumusan masalah.....	7
C. Tujuan Penelitian.....	7
D. Manfaat Penelitian.....	7
E. Fokus Penelitian	8
F. Literatur Review.....	8
G. Kerangka Konseptual	11
I. Ruang Lingkup Penelitian	25
J. Metode Penelitian.....	26

BAB II PROFIL KALURAHAN KARANGAWEN.....	34
A. Kondisi Geografis	34
B. Perekonomian Kalurahan	37
C. Sosial dan Budaya	46
D. Pendidikan	48
E. Kemiskinan.....	49
F. Data Penduduk Berdasarkan Mata Pencaharian.....	51
G. Prasarana dan Sarana Kalurahan	53
H. Pemerintahan Umum.....	55
BAB III DINAMIKA PERWUJUDAN DESA PRENEUR KALURAHAN KARANGAWEN, KAPANEWON GIRISUBO.....	57
A. Proses Perwujudan Desa Preneur	57
B. Kendala Mewujudkan Desa Preneur	71
BAB IV KESIMPULAN DAN SARAN	76
A. Kesimpulan.....	76
B. SARAN	77
DAFTAR PUSTAKA	78
LAMPIRAN BUKTI PENELITIAN	1

DAFTAR TABEL

Tabel 1. 1. Tahapan Desa Preneur	18
Tabel 1. 2. Data Informan	28
Tabel 2. 1. Pertumbuhan Ekonomi per Sektor	38
Tabel 2. 2. Luas wilayah hutan	40
Tabel 2. 3. Perkembangan Populasi Ternak di Kalurahan Karangawen.....	42
Tabel 2. 4. Data Industri Kecil Menengah di Kalurahan Karangawen	43
Tabel 2. 5. Data Kelompok Tani Berbasis Padukuhan	45
Tabel 2. 6. Data Kelompok Ternak.....	45
Tabel 2. 7. Jenis UMKM di Kalurahan Karangawen.....	45
Tabel 2. 8. Struktur Organisasi Preneur Karangawen.....	46
Tabel 2. 9. Tingkat Kesejahteraan Keluarga di Kalurahan Karangawen.....	47
Tabel 2. 10. Perkembangan Jumlah Penduduk Kalurahan Karangawen	47
Tabel 2. 11. Tingkat Pendidikan Penduduk Kalurahan Karangawen	48
Tabel 2. 12. Data Ruang/Kelas Sekolah dan Jumlah Guru Yang ada di Kalurahan Karangawen.....	49
Tabel 2. 13. Angka Kemiskinan Tahun 2016 – 2021 (Pendekatan Satuan Rumah Tangga Sasaran)	50
Tabel 2. 14. Tabel Ketenagakerjaan Kalurahan Karangawen.....	51
Tabel 2. 15. Tabel Pelaku UMKM Dibidang Kuliner	52
Tabel 3. 1 Tahapan Desa Preneur	57
Tabel 3. 2 Jenis UMKM di Kalurahan Karangawen.....	59

DAFTAR GAMBAR

Gambar 1. 1 Kerangka Pikir	25
Gambar 3. 1. Struktur Organisasi Preneur Karangawen	62
Gambar 3. 2. Produk Olahan.....	65
Gambar 3. 3. APBKAL Karangawen 2022 UMKM.....	66
Gambar 3. 4. Bazzar UMKM 2022.....	69
Gambar 3. 5. Stuktur Organisasi Desa Preneur.....	74

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Desa Preneur menjadi salah satu Program Strategis Pemerintah Daerah Istimewa Yogyakarta dalam upaya meningkatkan kompetensi ekonomi desa untuk mendorong percepatan pembangunan ekonomi di Perdesaan yang sampai saat ini kita dihadapkan dengan fakta bahwa orientasi pembangunan ekonomi masih belum merata. Geliat ekonomi perdesaan tidak semasif tumbuhnya sebagaimana wilayah urban, yang sebenarnya wilayah perdesaan juga memiliki potensi ekonomi dengan karakteristik unggul apabila dapat dikelola secara arif, benar, kreatif, dan berkelanjutan. Potensi ekonomi desa itu sangat besar dan dapat dioptimalkan oleh masyarakatnya. Dalam perspektif inilah, Desa Preneur hadir menjadi jawaban atas pentingnya semangat kewirausahaan ditumbuhkan secara masif melalui optimalisasi sumberdaya potensial. Kekayaan alam, keunikan bentang lahan, jejak historis desa, geliat agribisnis, hingga atraksi seni budaya serta kearifan khas perdesaan merupakan berlian yang menjadi kekuatan sebuah desa yang unggul dalam konteks kekhasan sebagai buah kearifan dari kebesaran alam semesta (Maulina. L dkk., 2022).

Desa Preneur merupakan desa yang mampu menumbuh kembangkan kewirausahaan melalui unit-unit usaha yang diupayakan oleh keguyuban warga desa secara terpadu dan berkelanjutan dalam rangka menumbuhkan perekonomian perdesaan. Merujuk kepada peraturan Gubernur Daerah Istimewa Yogyakarta nomor 20 tahun 2022 tentang petunjuk teknis pengembangan Desa Preneur Desa

Preneur dibentuk dan dikembangkan dengan tujuan: Meningkatkan kesejahteraan masyarakat desa melalui pengembangan potensi ekonomi secara berkelanjutan, Peningkatan semangat kewirausahaan dan kualitas sumber daya manusia para pelaku UMKM dan Menekan kerentanan social ekonomi dalam rangka mengurangi angka kemiskinan menekankan pengangguran melalui pemberdayaan ekonomi produktif secara berkelanjutan.

Kalurahan Karangawen sendiri bukan merupakan desa wisata sehingga perekonomian warga desa bisa dikatakan masih tertinggal jika dibandingkan dengan perekonomian desa wisata. Mayoritas masyarakat kalurahan Karangawen bekerja sebagai petani. Banyak hasil pertanian yang bisa dihasilkan dan dapat diangkat atau diolah menjadi bahan makanan yang bernilai jual tinggi, seperti singkong, kacang, pisang, ubi rambat, dan jagung. Dikalurahan karangawen banyak terdapat Kelompok Wanita Tani (KWT) Disetiap padukuhan dan dimana Kelompok Wanita Tani melakukan berbagai kegiatan yang berfokus pada pertanian dan olahan pangan (Nurjaya et al., 2021).

Dalam bidang pertanian, Kelompok Wanita Tani melakukan kegiatan bertani dengan cara alternatif yaitu menanam. Dikalurahan Karangawen memiliki banyak lahan pertanian untuk ditanam mereka banyak mengasilkan singkong, pisang, kacang dan jagung. Kelompok wantia tani melakukan pengolahan keripik singkong, yang bahan dasarnya dari telo dan pengeolahan kerupuk peyek yang bahan dasarnya dari kacang tanah dan jenis kerupuk lainnya. Dari pengolahan tersebut kelompok wanita tani dapat menjual di sekitaran Kalurahan (Maulina. L dkk., 2022).

Mengapa hanya di jual sekitaran kalurahan saja? Hal ini dikarenakan masyarakat sulit untuk memasarkannya selain itu masyarakat tidak memiliki mitra kerja. Informasi yang didapat dari ibu dukuh untuk olahan tersebut jika tidak laku terjual maka akan di jualkan kepada sesama masyarakat disetiap padukuhan.

Oleh karena itu pemerintah kalurahan berusaha mewujudkan atau ingin menjadikan kalurahan karangawen menjadi desa yang mandiri dengan cara menjadi Desa Preneur dengan mendorong pelaku umkm dan membentuk pengorganisasian kelompok umkm antar padukuhan dan menjadi satu organisasi agar bisa menciptakan produk yang memiliki kualitas yang tinggi dan membentuk panitia Desa Preneur guna untuk pengecekan kesiapan pelaku umkm yang ada didesa karangawen untuk menumbuhkan perekonomian masyarakat dan untuk meningkatkan produk unggulan lokal mewujudkan produk lokal desa agar mampu bersaing di tataran global tentu dibutuhkan upaya bersama secara komunal baik itu para pelaku usaha langsung yang ada di desa.

Pelaksanaan pengembangan Desa Preneur menjadi kewenangan Dinas Koperasi UKM DIY dapat dikonsolidasikan dengan pihak lain, yang memiliki konsep yang senada meskipun dengan branding yang berbeda. Meski demikian, identitas Desa Preneur adalah semangat utama dalam mengkampanyekan program ini meskipun dalam pelaksanaan yang dilakukan secara kemitraan dapat menggandeng konsep serupa memiliki tahapan yang sama dan tujuan akhir yang sama, seperti : Gerakan Global Gotong Royong (G2R) Tetra Preneur, Pemberdayaan Kiblat Papat Limo Pancer Adiluhung Kawentar (K45AK) merupakan model pelatihan Desa Preneur, dan sejenisnya (Harsono, 2021).

Monitoring pelaksanaan program kegiatan Desa Preneur dilakukan oleh pelaksana kegiatan yakni Bidang Layanan Kewirausahaan KUKM melalui Seksi Layanan Kewirausahaan Baru KUKM, secara berkala, sekurang-kurangnya setiap bulan sekali, dengan menggandeng tenaga ahli terkait pendampingan pada Desa Preneur. Pelaksana pendampingan Desa Preneur melalui tenaga ahli, memberikan laporan kepada Kepala Dinas Koperasi UKM DIY melalui Bidang Layanan Kewirausahaan KUKM, tentang pelaksanaan setiap tahapan pada tahun sekaligus memberikan rekomendasi status Desa Preneur yang sudah dilakukan pendampingan pada setiap awal tahun atau laporan rekomendasi disampaikan selambat-lambatnya pada Bulan Januari. Pendamping atau Konsultan PLUT akan diterjunkan pada setiap desa, sekaligus menjadi konsultan bagi tim pelaksana lapangan upaya pendampingan Desa Preneur. Pendamping atau konsultan PLUT wajib memberikan laporan hasil pendampingan pada lokasi kepada Bidang Layanan Kewirausahaan KUKM melalui Seksi Layanan Kewirausahaan Baru KUKM pada akhir pelaksanaan kegiatan. Keterlibatan konsultan PLUT menjadi konsultan pendamping Desa Preneur akan ditetapkan melalui SK Kepala Dinas

Adapun konsep Program Desa Preneur diinisiasi sejak tahun 2016, dan dilaksanakan tahun 2017 dengan menggunakan APBD. Desa Preneur menjadi salah satu respon terhadap isu kemiskinan yang ada di Daerah Istimewa Yogyakarta, memiliki tujuan untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat melalui pengembangan potensi usaha, peningkatan semangat kewirausahaan dan kualitas SDM para pelaku UMKM di Daerah Istimewa Yogyakarta. Karena itu, dengan prioritas pada peningkatan softskill dari para pelaku usaha, program Desa

Preneur terwujud dalam bentuk Pendidikan, Pelatihan, Fasilitasi, dan Pendampingan.

Desa Preneur merupakan desa yang memiliki kemampuan untuk menumbuhkan unit-unit usaha skala desa, yang diusahakan oleh warga desa itu sendiri melalui penguatan pengetahuan dan keterampilan berwirausaha, peningkatan mutu produk/jasa, nilai tambah, dan daya saing dengan tujuan untuk meningkatkan perekonomian desa dan tercapainya kesejahteraan hidup warga. Lembaga ekonomi desa, seperti: UMKM, koperasi, hingga BUM DESA harus terlibat aktif. Mereka dapat membentuk konsorsium bagi pemasaran bersama barang dan jasa yang diproduksi warga. Strategi pemasaran diarahkan pada pembentukan sekaligus penguatan branding produk barang atau jasa yang potensial desa

Dukungan lembaga, seperti: koperasi, BUM DESA, BUKP, atau perbankan hingga CSR; diharapkan menjadi mediator manakala ada kelompok usaha skala kecil yang memiliki produk barang atau jasa berorientasi ekspor. Peran lain dapat diwujudkan dalam bentuk pembinaan quality control bagi produk yang dihasilkan. Lembaga tersebut juga diharapkan berkontribusi mengatasi persoalan klasik yang selalu dihadapi usaha mikro dan kecil yaitu ketidakmampuan mengelola keuangan usaha dengan baik. Pada saat yang sama, secara kelembagaan mereka secara profesional dapat menjadi penyalur kredit usaha rakyat (Agung et al., 2023).

Selain itu, dukungan pemasaran secara digital merupakan terobosan yang harus diupayakan bagi wirausahawan desa dalam memasarkan produknya menembus ruang dan waktu. Branding produk hingga pencantuman merek dan tatakelola promosi yang berkelanjutan; menjadi strategi yang tidak boleh

dikesampingkan. Pengembangan marketplace yang terintegrasi atau dilakukan secara mandiri adalah peluang baru yang dapat menjadi pilihan dalam pengembangan Desa Preneur untuk terus menumbuhkan kehidupan kewirausahaan yang tangguh penuh inovasi dan kreatifitas untuk mewujudkan peradaban baru demi kemuliaan martabat manusia Jogja (Puspitasari, 2015).

Untuk itu pengembangan Desa Preneur sangat diperlukan dalam rangka mengakselerasi pemberdayaan masyarakat dalam meningkatkan kesejahteraannya. Kampanye Desa Preneur tidak hanya dibatasi melalui wilayah perdesaan saja, melainkan juga dapat dilakukan pada wilayah perkotaan yang memiliki potensi dikembangkan menjadi wilayah entrepreneurship yang dapat menjadi contoh pengembangan wilayah melalui pengembangan wirausaha secara masif. Desa Preneur sekaligus menjadi branding dalam pengentasan kemiskinan dan kampanye pemberdayaan masyarakat melalui optimalisasi ekonomi / potensi local secara berkelanjutan, baik di desa maupun di kota (Triyo et al., 2020).

Kelompok wirausaha di dalam sebuah Desa Preneur terdiri dari beberapa kelompok usaha yang terdiri dari unsur warga desa baik terdiri : pemuda, petani, perempuan desa, wirausahawan desa, dan pekerja potensial yang memiliki peran, baik ditingkat perencanaan, implementasi dan evaluasi Kelompok usaha dalam Desa Preneur menjamin produk/jasa yang dihasilkan mencukupi dalam hal jumlah dan menjamin produk/jasa secara kualitas dengan memperhatikan selera pasar untuk menumbuhkan daya saing dalam pasar (Imawan et al., 2019).

Dari latar belakang diatas penulis mengkaji penelitian ini dengan menggunakan Perspektif *Governing*. Adapun Perspektif *Governing* merupakan perbuatan pemerintah atau aktivitas pemerintah. *Governing* mengandung proses

politik, hukum, dan administrasi (Eko, 2021). Gagasan ideal dalam konteks ini adalah fungsi ekstraksi, distribusi, proteksi, dan koreksi yang dijalankan oleh pemerintah atas negara, warga, dan Masyarakat.

Pada perspektif tersebut Pemerintah Kalurahan Karangawen dipandang sebagai satu-satunya aktor yang melaksanakan fungsi-fungsi pemerintahan guna mewujudkan Desa Preneur. Konteksnya ada pada tataran terkait peranan atau upaya Pemerintah Kalurahan Karangawen untuk mengatur dan mengurus pembentukan Kalurahan Karangawen menjadi Desa Preneur dengan memperhatikan proses, fungsi, dan hasil.

B. Rumusan masalah

Dari latar belakang yang sudah diuraikan diatas, sehingga memfokuskan topik penelitian maka permasalahan yang dapat dirumuskan sebagai berikut “Bagaimana peran pemerintah kalurahan Karangawen kabupaten Gunungkidul dalam mewujudkan Desa Preneur?”

C. Tujuan Penelitian

1. Untuk mendeskripsikan peran pemerintah Kalurahan Karangawen dalam mewujudkan Desa Preneur.
2. Untuk mengetahui kendala-kendala yang dihadapi oleh pemerintah Kalurahan Karangawen dalam mewujudkan Desa Preneur.

D. Manfaat Penelitian

Teoritis

Penelitian ini diharapkan dapat memberikan uraian yang objektif sesuai kondisi nyata mengenai peran pemerintah kalurahan Karangawen, Kabupaten Gunung Kidul, Daerah Istimewa Yogyakarta dalam mewujudkan Desa Preneur.

Praktik

Secara praktis penelitian ini dapat dimanfaatkan bagi para praktisi. Disamping itu, penelitian ini juga dapat bermanfaat bagi para praktisi kebijakan publik dalam mengambil kebijakan terbaik dalam merumuskan strategi mewujudkan Desa Preneur, sehingga kebijakan yang dibuat dapat langsung di realisasikan.

E. Fokus Penelitian

Fokus pada penelitian ini antara lain:

1. Peran pemerintah kalurahan dalam mewujudkan Desa Preneur
2. Tantangan dan kendala peran pemerintah kalurahan dalam mewujudkan Desa Preneur.

F. Literatur Review

Dalam mengerjakan penelitian ini, peneliti menggunakan beberapa literatur untuk menghimpun, mengkomparasikan dan mengelaborasi beberapa sumber penelitian yang berkaitan dan berkesinambungan dengan penelitian. Sesuai dengan topik penelitian yaitu bagaimana peran pemerintah kalurahan Karangawen

kabupaten Gunung Kidul dalam mewujudkan Desa Preneur. Sehingga literatur review pada penelitian ini adalah sebagai berikut:

Dalam jurnal “Kare – Kare: Pengembangan Desa Preneur Berbasis Inovasi Makanan Khas Lombok (Kare-Kare) Masyarakat Di Desa Sukadana Kec.Pujut Kab. Loteng, Ntb”, untuk melahirkan Desa Preneur dibutuhkan mineset membangun usaha dengan mengutamakan pembuatan produk khas desa secara spesifik. Agar Desa Preneur terlaksana mesti ada support dari stake holders seperti kepala desa, staff desa dan warga setempat yang siap untuk membantu untuk menjalankan dan mensukseskan rencana yang telah disusun untuk mengembangkan produk khas desa tertentu. Proses yang harus dilakukan juga harus berkesinambungan, mulai dari perencanaan, proses produksi hingga evaluasi hasil produksi (Sudirman Dkk., 2022).

Dalam literatur lain Kontribusi Pemerintah Kalurahan Dalam Pengelolaan Badan Usaha Milik Desa (BUM Desa) dalam mewujudkan Desa Preneur Badan Usaha Milik Desa (BUM Desa) didirikan dengan tujuan Pemerintahan setempat dapat memanfaatkan potensi yang ada di desa dengan tujuan untuk memberikan peningkatan pendapatan asli desa, memberikan lapangan pekerjaan bagi masyarakat. Dengan adanya keberadaan BUM Desa dapat menekan angka kemiskinan, meningkatkan kesejahteraan masyarakat serta mengoptimisasi pontensi alam.

Literatur Jurnal lain dalam tujuan mewujudkan Desa Preneur, “Pengelolaan Desa Wisata Pandanrejo Menuju Desapreneur”, Desa wisata merupakan salah satu tumpuan bagi pemerintah untuk mendorong pertumbuhan ekonomi sekaligus pengembangan usaha mikro, kecil, dan menengah (UMKM) di suatu desa. Desa

Preneur memiliki tujuan untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat melalui pengembangan potensi usaha, peningkatan semangat kewirausahaan dan kualitas SDM para pelaku UMKM. Desa Preneur merupakan desa yang memiliki kemampuan untuk menumbuhkan unit-unit usaha skala desa, yang diusahakan oleh warga desa itu sendiri melalui penguatan pengetahuan dan keterampilan berwirausaha, peningkatan mutu produk/jasa, nilai tambah, dan daya saing dengan tujuan untuk meningkatkan perekonomian desa dan tercapainya kesejahteraan hidup warga (Maulina L. Dkk., 2022).

Dalam Jurnal “Wirausaha Muda Membangun Desa: Dinamika Partisipasi Pembangunan Desa”, Kondisi wilayah perdesaan yang ada di Indonesia memiliki beragam karakteristik sosial ekonomi dan tingkat perkembangannya. Secara umum dalam perumusan kebijakan pembangunan, desa dapat dikelompokkan menjadi 3 (tiga) yaitu desa cepat berkembang, desa potensial berkembang dan desa tertinggal. Desa cepat berkembang kebanyakan adalah desa yang dekat dengan atau mempunyai akses yang mudah ke kota. Kegiatan ekonomi masyarakatnya sudah mulai berorientasi pada ekonomi pasar dan menunjukkan perubahan dalam adat dan kebudayaannya. Sementara kelompok desa potensial berkembang, kegiatan ekonomi masyarakatnya ada di sektor primer yaitu pertanian dan pertambangan dengan ciri homogen dalam hal adat dan kebudayaannya.

Dalam jurnal “Membangun Kemandirian Ekonomi Desa melalui Peningkatan Daya Saing Potensi Kekayaan Alam Perdesaan”, pengembangan lokal Desa merupakan integrasi pembangunan yang memadukan dimensi ekonomi dengan dimensi lainnya seperti, sosial, budaya, dan institusi dengan penekanan

pada konteks spasial yang bersifat lokal. Pengembangan yang dimaksud tersebut merupakan proses yang ada di masyarakat, pemerintah, para pelaku usaha, dan sektor non-pemerintah lainnya bekerja bersama-sama untuk menciptakan kondisi yang lebih baik pada pertumbuhan ekonomi maupun kesejahteraan masyarakat. Kerangka kajian keberlangsungan hidup manusia tidak habis – habisnya membahas salah satu fenomena, yaitu pembangunan. Pembangunan sebagai salah satu fenomena yang melekat dalam salah satu ciri kehidupan manusia kerap mengalami perubahan mengikuti berbagai dimensi yang ada. Konteks kajian suatu perubahan biasanya dilekatkan dengan konsep pembangunan yang diartikan sebagai bentuk perubahan terencana, perubahan yang mempunyai bentuk lebih baik daripada keadaan sebelumnya dan diharapkan oleh setiap orang atau kelompok tertentu. Perencanaan diperlukan untuk mewujudkan harapan tersebut.

G. Kerangka Konseptual

1. Peran Pemerintah Kalurahan

Peran merupakan aspek dinamis dari kedudukan seseorang dalam struktur sosial karena kedudukannya melakukan suatu tindakan atau gerak perubahan yang dinamis, dimana dari pola tindakan tersebut mengakibatkan terjadinya suatu hal atau peristiwa (Soekanto, 1980: 2). Status atau kedudukan tidak dapat dipisahkan dengan peran. Dan tidak ada peran tanpa kedudukan.

Manusia memiliki perannya masing-masing sesuai dengan pola dan kapasitasnya (status atau kedudukan) dalam pergaulan sosial. Menurut Rivai (2004: 148) peran merupakan perilaku seseorang yang diharapkan dapat membuat

suatu perubahan serta harapan yang mengarah pada kemajuan, meskipun tidak selamanya sesuai dengan apa yang diharapkan.

Lebih lanjut Rivai mengaitkan peran sebagai tolak ukur kinerja seseorang. Peran dapat dijadikan tolak ukur seseorang sebagai pemimpin apakah orang itu dapat memaksimalkan kinerjanya dalam menjalankan tugas-tugas yang diberikan kepadanya ataukah tidak. Sedangkan Levinson dalam Syani (1994: 54) menguraikan peran ke dalam tiga cakupan. Pertama, meliputi norma-norma yang dihubungkan dengan posisi atau tempat seseorang dalam masyarakat. Peran dalam arti ini merupakan rangkaian peraturan-peraturan yang membimbing seseorang dalam kehidupan kemasyarakatan. Kedua, peran merupakan suatu konsep tentang apa yang dapat dilakukan oleh individu dalam masyarakat sebagai organisasi. Ketiga, peran juga dapat dipandang sebagai perilaku individu yang penting bagi struktur sosial masyarakat.

2. Pemerintah Desa

a. Kewenangan Desa

Pasal 5 Undang – Undang Nomer 6 Tahun 2014 tentang desa dengan tegas mengakui bahwa kedudukan desa bukan menjadi subordinat kabupaten/kota, melainkan berada di wilayah kabupaten/kota. Atas dasar kedudukan seperti ini, maka desa masa lalu pasti sudah memiliki kekuasaan yang absah untuk melakukan tindakantindakan mengatur dan mengurus kepentingan masyarakat desa. Masa kini dan masa depan desa pun masih memiliki kehendak untuk memikirkan kepentingan masyarakat desa. Karena itu negara melalui Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa mengakui dan menghormati bahwa

desa memiliki kewenangan desa. Kewenangan desa ini bukan pelimpahan dari pemerintahan supradesa, tetapi rekognisi (pengakuan) dan subsidiaritas (penghormatan) dari negara.

Berdasarkan hal di atas dapat diketahui bahwa alasan harus ada kewenangan desa karena 2 (dua) hal, yaitu: 1) mandatori UndangUndang Nomor 6 Tahun 2016 tentang Desa; dan 2) mandatori asas rekognisi dan subsidiaritas. Pertama, kewenangan desa secara jelas diatur dalam UndangUndang Nomor 6 Tahun 2016 tentang Desa dan peraturan teknis turunannya, yaitu Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan UndangUndang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa yang telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 47 Tahun 2015 dan Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi Nomor 1 Tahun 2015 tentang Pedoman Kewenangan Berdasarkan Hak Asal Usul dan Kewenangan Lokal Berskala Desa (Fauzan, 2022).

Berdasarkan Pasal 37 Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan UndangUndang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa dan Pasal 16 sampai dengan Pasal 22 Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi Nomor 1 Tahun 2015 tentang Pedoman Kewenangan Berdasarkan Hak Asal Usul dan Kewenangan Lokal Berskala Desa menghendaki proses penetapan kewenangan desa berdasarkan asal usul dan lokal berskala desa melalui pembentukan peraturan bupati dan peraturan desa. Artinya, pengaturan tentang kewenangan desa belum cukup jika hanya mendasarkan pada regulasi di tingkat pusat. Mandat Undang – Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa mengenai kewenangan desa akan berjalan baik ketika bupati menetapkan

peraturan bupati tentang daftar kewenangan desa dan desa membentuk peraturan desa tentang kewenangan desa.

Kedua, mandatori asas rekognisi dan subsidiaritas. Asas rekognisi digunakan untuk mengakui desa yang tetap mewarisi pengaturan dan pengurusan kepentingan desa dan masyarakat sampai saat ini, maupun mengakui prakarsa masyarakat desa dalam merespin perkembangan kehidupan. Sedangkan asas subsidiaritas digunakan untuk menghormati desa yang selama ini telah dan/atau mampu menjalankan urusanurusan desa maupun prakarsa desa/masyarakat desa secara efektif (Ali & Saputra, 2020).

Dalam Pasal 18 UndangUndang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa disebutkan bahwa kewenangan desa meliputi kewenangan di bidang penyelenggaraan pemerintahan desa, pelaksanaan pembangunan desa, pembinaan kemasyarakatan desa, dan pemberdayaan masyarakat desa berdasarkan prakarsa masyarakat, hak asal usul, dan adat istiadat desa. Kewenangan desa tersebut meliputi: a. kewenangan berdasarkan hak asal usul; b. kewenangan lokal berskala desa; c. kewenangan yang ditugaskan oleh pemerintah, pemerintah daerah provinsi, atau pemerintah daerah kabupaten/kota; dan d. kewenangan lain yang ditugaskan oleh pemerintah, pemerintah daerah provinsi, pemerintah daerah kabupaten/kota sesuai dengan ketentuan peraturan perundangundangan (Mardiyanti1, Asrofi Lannggeng Noerman Syah, 2018).

b. Kepala Desa

Kepala Desa adalah pemerintah Desa atau yang disebut dengan nama lain yang dibantu perangkat Desa sebagai unsur penyelenggaraan pemerintahan Desa (UU RI No 6 Tahun 2014 Pasal 1 Ayat (3)). Kepala Desa bertugas menyelenggarakan pemerintahan Desa, dan pemberdayaan Desa (UU RI No 6 Tahun 2014 Pasal 26 Ayat 1). Dan dibantu oleh Perangkat Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (2) berkedudukan sebagai unsur pembantu Kepala Desa. Proses pengangkatan kepala Desa yaitu dengan menggunakan mekanisme pemilihan kepala Desa dengan tahapan persiapan, pencalonan, pemungutan suara dan penetapan, proses pemilihan kepala Desa ini dilakukan sesuai dengan masa jabatan kepala Desa selama 6 tahun masa jabatan terhitung sejak tanggal dilantik. Kewenangan Desa meliputi kewenangan di bidang penyelenggaraan Pemerintahan Desa, pelaksanaan Pembangunan Desa, pembinaan kemasyarakatan Desa, dan pemberdayaan masyarakat Desa berdasarkan prakarsa masyarakat, hak asal usul, dan adat istiadat Desa Pasal 18 Undang-Undang No. 6 Tahun 2014. Kewenangan Desa meliputi (Pasal 19 Undang-Undang No. 6 Tahun 2014:

- 1) kewenangan berdasarkan hak asal usul;
- 2) kewenangan lokal berskala Desa;
- 3) kewenangan yang ditugaskan oleh Pemerintah, Pemerintah Daerah Provinsi, atau Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota;
- 4) kewenangan lain yg ditugaskan oleh Pemerintah, Pemerintah Daerah Provinsi, atau Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Adapun wewenang Kepala Desa:
 - a) memimpin penyelenggaraan Pemerintahan Desa;

- b) mengangkat dan memberhentikan perangkat Desa;
- c) memegang kekuasaan pengelolaan Keuangan dan Aset Desa;
- d) menetapkan Peraturan Desa;
- e) menetapkan APBelanjaDesa;
- f) membina kehidupan masyarakat Desa;
- g) membina ketenteraman dan ketertiban masyarakat Desa;
- h) membina dan meningkatkan perekonomian Desa serta mengintegrasikannya agar mencapai perekonomian skala produktif untuk sebesar-besarnya kemakmuran msyt Desa;
- i) mengembangkan sumber pendapatan Desa;
- j) mengusulkan dan menerima pelimpahan sebagian kekayaan negara guna meningkatkan kesejahteraan masyarakat Desa;
- k) mengembangkan kehidupan sosial budaya masyarakat Desa;
- l) memanfaatkan teknologi tepat guna;
- m) mengoordinasikan Pembangunan Desa secara partisipatif;
- n) mewakili Desa di dalam dan di luar pengadilan atau menunjuk kuasa hukum untuk mewakilinya sesuai dengan ketentuan peraturan perundangundangan;
- o) melaksanakan wewenang lain yang sesuai dengan ketentuan peraturan perundangundangan (Imawan et al., 2019).

c. Perangkat desa

Perangkat Desa adalah bagian dari unsur pemerintah desa yang terdiri dari sekretaris desa dan perangkat desa lainnya yang merupakan Aparatur pemerintah

desa di bawah naungan kepala desa. Adapun perangkat desa lainnya yang dimaksud biasanya jumlah dan sebutannya disesuaikan dengan kebutuhan dan kondisi sosial budaya masyarakat setempat yang biasa dikenal dengan sebutan kepala urusan/kepala seksi dan unsur kewilayahan/ kepala dusun yang ada di setiap pemerintahan desa. Hal ini juga diatur dalam Struktur Organisasi Tata Kerja Kepemerintahan (SOTK). Berdasarkan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa Pasal 48, bahwa: Perangkat Desa terdiri atas:

- 1) sekretariat Desa;
- 2) pelaksana kewilayahan; dan
- 3) pelaksana teknis Perangkat desa (Los, n.d. 2021).

3. Desa Preneur

Desa Preneur adalah sebuah inisiatif yang bertujuan untuk mendorong kewirausahaan di tingkat desa atau pedesaan. Konsep Desa Preneur menggabungkan kata "desa" yang merujuk pada wilayah pedesaan dan "preneur" yang merupakan singkatan dari entrepreneur atau wirausahawan dalam bahasa Inggris.

Desa Preneur bertujuan untuk mengembangkan potensi ekonomi di desa melalui pembentukan dan pendampingan para wirausahawan lokal. Inisiatif ini berfokus pada pengembangan usaha mikro, kecil, dan menengah (UMKM) di pedesaan. Dengan demikian, Desa Preneur berupaya menciptakan lapangan kerja, meningkatkan pendapatan masyarakat desa, serta mengurangi kesenjangan ekonomi antara daerah perkotaan dan pedesaan.

Berdasarkan Peraturan Gubernur Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 20 Tahun 2022 tentang Petunjuk Teknis Pengembangan Desa Preneur yang kemudian diolah oleh Dinas Koperasi dan UKM DIY dalam sebuah Modul yang berjudul ‘Upaya Pengentasan Kemiskinan Melalui Pemberdayaan UMKM’ diperoleh indikator Tahapan Desa Preneur seperti Tabel 3.1 di bawah ini:

Tabel 1. 1. Tahapan Desa Preneur

TAHAPAN	TUJUAN	INDIKATOR
PENUMBUHAN	Mengidentifikasi <i>local wisdom</i> yang dapat diterima sebagai <i>global value</i> dan dikembangkan menjadi prototipe produk, baik barang atau jasa (kuadran atas kiri dan kanan).	Terwujudnya prototipe produk- produk, baik barang maupun jasa, yang layak untuk dikembangkan.
BERKEMBANG	Mengembangkan dan mewujudkan prototipe produk menjadi produk yang berorientasi pada <i>local supply chain</i> (kuadran kiri bawah).	Terwujudnya produk- produk, baik barang maupun jasa, yang bernilai jual tinggi (adiluhung).
MAJU	Mendesain dan mewujudkan konsep pemasaran global, baik daring maupun non daring, sehingga produk bisa dinikmati konsumen (kuadran kanan bawah).	Terdistribusinya produk- produk ke konsumen dalam skala global (kawentar).

Sumber: Dinas Koperasi dan UKM DIY 2022.

Berdasarkan pada tabel 1.1 diatas, kita memperoleh informasi bahwasanya ada tiga tahapan atau penulis menyebutnya sebuah kategori dalam mewujudkan Desa Preneur. Kategori pertama adalah ‘penumbuhan’ yang bertujuan untuk mengidentifikasi kearifan lokal yang dapat diterima sebagai nilai global dan dikembangkan menjadi beberapa jenis produk. Alat ukur/ indikator keberhasilannya adalah terwujudnya beberapa produk-produk, baik barang maupun jasa, yang layak untuk dikembangkan.

Kategori tahapan yang kedua adalah ‘berkembang’ yang bertujuan untuk mengembangkan dan mewujudkan beberapa gambaran atau jenis produk yang orientasinya pada rantai pasokal lokal. Indikator keberhasilannya adalah dengan

terwujudnya produk-produk, baik barang maupun jasa, yang bernilai jual tinggi (*adiluhung*). Kategori ketiga adalah ‘Maju’ yang tujuannya untuk mendesain dan mewujudkan konsep pemasaran global, baik daring maupun non daring, sehingga produk bisa dinikmati konsumen. Indikator keberhasilannya adalah terdistribusinya produk-produk dalam skala global.

Ketiga kategori tahapan diatas akan menjadi acuan penulis dalam menganalisis terhadap temuan-temuan dilapangan, baik melalui observasi, wawancara, dan dokumentasi terkait dengan proses perwujudan Desa Preneur yang dilakukan oleh Pemerintah Kalurahan (Pemkal) Karangawen. Setidaknya ketika kategori tersebut dapat menjadi alat ukur, proses yang sudah dan atau sedang dilakukan oleh Pemkal Karangawen itu sampai pada tahapan apa.

Desa Preneur biasanya melibatkan beberapa kegiatan, seperti:

a. Pelatihan dan pendampingan

Desa Preneur memberikan pelatihan dan pendampingan kepada para calon wirausahawan desa untuk membantu mereka memahami konsep bisnis, pengelolaan keuangan, pemasaran, dan keterampilan lain yang dibutuhkan dalam menjalankan usaha.

b. Pemberian modal usaha

Desa Preneur juga dapat memberikan akses modal usaha kepada wirausahawan desa yang memiliki potensi untuk mengembangkan usaha mereka. Modal ini bisa berupa pinjaman, hibah, atau bentuk bantuan lainnya.

c. Pemasaran dan jaringan

Desa Preneur membantu memasarkan produk-produk UMKM desa ke pasar yang lebih luas melalui strategi pemasaran yang efektif. Selain itu, Desa Preneur juga membangun jaringan antara wirausahawan desa dengan pihak-pihak terkait, seperti pemasok bahan baku, distributor, dan mitra bisnis lainnya.

d. Pengembangan produk dan kualitas

Desa Preneur mendorong pengembangan produk-produk unggulan dari desa dengan meningkatkan kualitas, keaslian, dan nilai tambah produk tersebut. Hal ini bertujuan untuk meningkatkan daya saing produk desa di pasar. Dengan adanya Desa Preneur, diharapkan masyarakat desa dapat mengembangkan potensi ekonominya secara mandiri dan berkelanjutan. Inisiatif ini juga berperan dalam meningkatkan kesejahteraan masyarakat desa serta memperkuat ekonomi lokal.

Fokus dan Lokus Desa Preneur difokuskan pada pengembangan dinamika wirausaha dalam kehidupan. Untuk itu, syarat fokus keberhasilan pengembangan Desa Preneur, harus memperhatikan terwujudnya situasi:

- a. Kelompok dan keanggotaan wirausaha desa Kelompok wirausaha di dalam sebuah Desa Preneur terdiri dari beberapa kelompok usaha yang terdiri dari unsur warga desa (baik terdiri: pemuda, petani, perempuan desa, wirausahawan desa, dan pekerja potensial) yang memiliki peran, baik ditingkat perencanaan, implementasi dan evaluasi.
- b. Kapasitas dan kualitas produk/jasa Kelompok usaha dalam Desa Preneur menjamin produk/jasa yang dihasilkan mencukupi dalam hal jumlah dan

menjamin produk/jasa secara kualitas dengan memperhatikan selera pasar untuk menumbuhkan daya saing dalam pasar.

- c. Tata Kelola keuangan dan administrasi Desa Preneur menjadi tata kelola usaha, baik administrasi keuangan berjalan secara inklusif.
- d. Pembinaan dan pendampingan desa Desa Preneur menyediakan mekanisme pembinaan dan pendampingan bagi kelompok usaha warga desa untuk memperoleh pengetahuan dan keterampilan dalam menjalankan dan mengembangkan usahanya.
- e. Benchmarking, Pemasaran dan Promosi Desa Preneur melakukan benchmarking terhadap produk-produk unggulan dan melakukan promosi dan pemasaran baik offline maupun online.
- f. Keluasan dampak dan Keberlanjutan Desa Preneur memiliki dampak dalam pengurangan kemiskinan dan peningkatan kesejahteraan warga desa melalui pemerataan ekonomi. Desa Preneur juga memastikan keberlanjutan usahanya.
- g. Semangat Pemulihan Desa Preneur memiliki upaya untuk melakukan *recovery* atau penanganan atas suatu tekanan/ kerentanan/ bencana/ *pandemic* yang berdampak pada aktifitas social-ekonomi dalam rangka mengembalikan semangat kreatifitas dalam berwirausaha dan bangkit dari keterpurukan

Adapun lokus Desa Preneur adalah desa atau kelurahan di wilayah Daerah Istimewa Yogyakarta, yang:

1. Wilayah yang memiliki potensi usaha, baik barang atau jasa, yang diusahakan oleh sekurangnya 10 orang, baik dilakukan secara personal maupun kelompok
2. Wilayah yang berada pada kondisi salah satu atau lebih kondisi pada : wilayah kecamatan kantong kemiskinan (sesuai kebijakan Pemerintah Daerah), atau memiliki status desa budaya (ditetapkan sesuai kebijakan Dinas Kebudayaan DIY), atau memiliki status desa prima (ditetapkan sesuai kebijakan DP3AP2 DIY), atau memiliki status desa wisata (ditetapkan sesuai kebijakan Dinas Pariwisata DIY), atau memiliki status desa rawan pangan (ditetapkan sesuai kebijakan Dinas Pertanian & Ketahanan Pangan DIY), atau ditetapkan tersendiri oleh Keputusan Kepala Dinas Koperasi UKM DIY

Penetapan lokus Desa Preneur dimaksudkan adanya integrasi penanganan wilayah secara terintegrasi lintas sektoral, melalui sentuhan skema pemberdayaan yang sudah dilakukan sektor lainnya, dengan memperhatikan adanya keterpaduan koordinatif antara pemangku kepentingan sesuai kewenangannya. Lokasi Desa Preneur juga dapat ditetapkan dengan memperhatikan orientasi kebijakan pada tataran Pemerintah Pusat, melalui Kementerian/Lembaga dan juga kebijakan strategis yang perlu diambil terkait dengan kerjasama tertentu dengan lembaga BUMN/BUMD/swasta yang memiliki irisan kepentingan yang sama dalam memaknai pemberdayaan masyarakat melalui skema Desa Preneur, apabila ditemukan kondisi diluar prasyarat penentuan lokus Desa Preneur sebagaimana tersebut diatas.

4. Partisipasi Masyarakat

Partisipasi masyarakat desa merujuk pada keterlibatan aktif penduduk desa dalam proses pengambilan keputusan, perencanaan, pelaksanaan, dan evaluasi kebijakan serta program-program pembangunan yang berdampak pada kehidupan mereka. Partisipasi masyarakat desa penting dalam memastikan bahwa keputusan dan kebijakan yang diambil memperhatikan kebutuhan, aspirasi, dan kepentingan nyata masyarakat setempat (Samaun, R., Bakri, B., & Mediansyah, 2021). Berikut beberapa bentuk partisipasi masyarakat desa yang umum:

- a. **Musyawarah Desa:** Musyawarah desa adalah forum dimana masyarakat desa secara kolektif berdiskusi dan mengambil keputusan terkait berbagai masalah desa. Musyawarah desa melibatkan seluruh penduduk desa atau perwakilan warga dalam mengambil keputusan penting, seperti perencanaan pembangunan desa, alokasi anggaran, dan masalah-masalah sosial lainnya.
- b. **Pengorganisasian Masyarakat:** Partisipasi masyarakat desa juga dapat dilakukan melalui pembentukan organisasi-organisasi masyarakat seperti kelompok petani, kelompok wanita, kelompok pemuda, dan kelompok-kelompok lainnya. Organisasi-organisasi ini dapat menjadi wadah untuk masyarakat desa berdiskusi, berbagi informasi, mengidentifikasi masalah bersama, dan mengambil langkah-langkah bersama untuk memperbaiki kondisi desa.
- c. **Penyuluhan dan Pelatihan:** Penyuluhan dan pelatihan yang diselenggarakan oleh pemerintah atau lembaga lain dapat memberikan

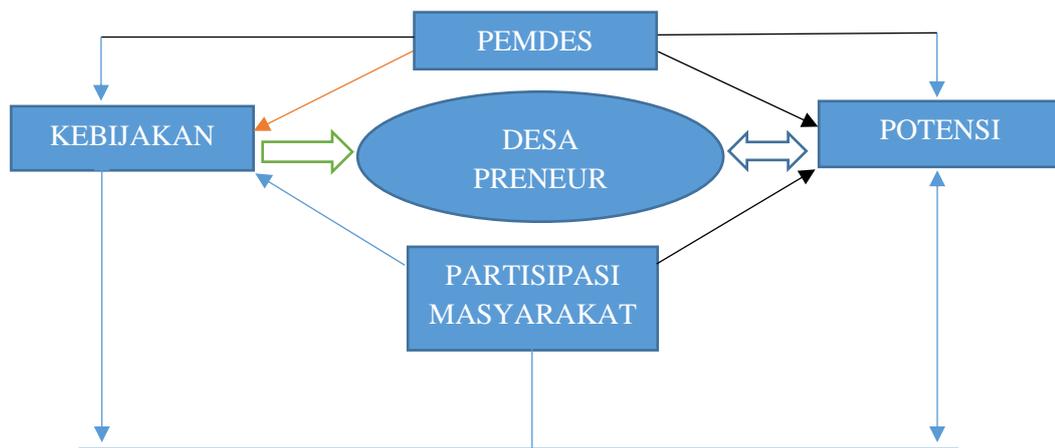
kesempatan kepada masyarakat desa untuk memperoleh pengetahuan dan keterampilan yang diperlukan dalam pembangunan desa. Melalui pelatihan ini, masyarakat desa dapat belajar tentang teknik pertanian yang lebih efektif, pengelolaan sumber daya alam yang berkelanjutan, kewirausahaan, atau keterampilan lain yang mendukung pembangunan desa.

- d. Evaluasi dan Pengawasan: Partisipasi masyarakat desa juga dapat dilakukan melalui proses evaluasi dan pengawasan terhadap kebijakan dan program-program yang telah diimplementasikan. Masyarakat desa dapat terlibat dalam memantau pelaksanaan kebijakan, mengidentifikasi masalah atau kekurangan, serta memberikan masukan untuk perbaikan dan perubahan yang diperlukan.
- e. Kolaborasi dengan Pihak Eksternal: Masyarakat desa juga dapat berpartisipasi melalui kolaborasi dengan pihak eksternal, seperti organisasi non-pemerintah (NGO), lembaga donor, atau mitra pembangunan lainnya. Kolaborasi ini dapat melibatkan masyarakat desa dalam perencanaan dan pelaksanaan proyek-proyek pembangunan, serta memastikan bahwa kepentingan dan aspirasi mereka diperhatikan.
- f. Partisipasi masyarakat desa merupakan prinsip dasar dalam pemerintahan yang demokratis dan berkelanjutan. Dengan melibatkan masyarakat desa secara aktif dalam proses pengambilan keputusan dan pembangunan (Desrinelti et al., 2021).

H. Kerangka Pikir

Paparan kerangka konsep diatas menghantarkan peneliti pada pembentukan kerangka pikir yang digunakan dalam studi ini. Pada dasarnya Pemerintah Desa memiliki kewenangan dalam pemberdayaan Masyarakat dengan mengeluarkan sebuah kebijakan terkait desa preneur. Kebijakan terkait desa preneur tentunya berangkat dari memperhatikan potensi yang ada pada desa dan didukung oleh partisipasi Masyarakat. Untuk selengkapnya dapat dilihat pada gambar 3.1 dibawah ini

Gambar 1. 1 Kerangka Pikir



Sumber: Bagan Desa Preneur

I. Ruang Lingkup Penelitian

Ruang lingkup dalam penelitian ini antara lain:

1. Proses Pemerintah Kalurahan Karangawen Dalam Mewujudkan Desa Preneur:
 - a. Tahap Penumbuhan;
 - b. Tahap Perkembangan;

- c. Tahap Kemajuan.
2. Tantangan dan Kendala Peran Pemerintah Kalurahan Karangawen Dalam Mewujudkan Desa Preneur.

J. Metode Penelitian

1. Jenis Penelitian

Pada penelitian ini, peneliti menggunakan metode penelitian kualitatif dengan pendekatan eksplanasi. Metode penelitian kualitatif memiliki pendekatan beragam dalam melakukan penelitian, prosedur kualitatif mengandalkan data berupa teks, gambar dan memiliki cara yang berbeda dalam menganalisis data yang bersumber dari penelitian yang berbeda-beda, jenis penelitian ini peneliti menggunakan eksplanasi yakni penelitian yang mengkaji keterkaitan sebab akibat antara beberapa fenomena.

Penelitian yang bersifat eksplanasi dipergunakan dalam menentukan apakah suatu hubungan antara sebab dan akibat benar atau tidak, penelitian ini bertitik pada pertanyaan dasar dengan pendekatan kualitatif dan lebih memungkinkan untuk mengamati fenomena lebih dekat dan mendalam dengan melakukan interaksi langsung dengan subjek penelitian. Berdasarkan keterangan tersebut dapat dikatakan bahwa jenis

penelitian ini menggunakan pendekatan eksplanasi kualitatif yang tertuju pada pemecahan masalah dengan menggambarkan fakta atau data secara empiris tentang Peran Pemerintah Kalurahan Karangawen Dalam Mewujudkan Desa Preneur.

2. Unit Analisis

Unit analisis adalah suatu penjelasan mengenai topik penelitian dalam satu kesatuan pemahaman. Unit analisis berkaitan dengan fenomena sosial yang dipilih sebagai topik penelitian (Bungin, 2007). Bungin menambahkan bahwa dalam penelitian kualitatif unit analisis penelitian bisa berupa individu, kelompok atau keluarga, masyarakat, serta kelembagaan sosial atau pranata sosial. Unit analisis dalam penelitian ini adalah:

a. Lokasi penelitian

Lokasi penelitian dalam hal ini bertempat di Kalurahan Karangawen, Kapanewon Girisubo, Kabupaten Gunungkidul, Daerah Istimewa Yogyakarta.

b. Obyek Penelitian

Obyek dalam penelitian ini adalah bagaimana mewujudkan Desa Preneur dan melihat kendala-kendala apa saja yang terjadi untuk mewujudkan Desa Preneur.

c. Subyek Penelitian

Subyek penelitian merupakan informan yang terkait dengan orang-orang yang dapat memberikan informasi. Teknik yang digunakan untuk menentukan infoman dengan cara teknik purposive yaitu, mengambil

narasumber data berdasarkan kriteria yang dimiliki oleh peneliti dalam penentuan informan yang dianggap relevan untuk dapat memberikan informasi mengenai strategi pemerintah kalurahan karangawen dalam mewujudkan Desa Preneur, narasumber dalam penelitian ini terdiri dari sebagai berikut:

Tabel 1. 2. Data Informan

No	Nama	Umur (Thn)	Tingkat Pendidikan	Jabatan/Pekerjaan
1	Erman Susilo S.I.P	45	S1	Lurah
2	Hendie Andreas Toto	35	SMA	Carik
3	Sunarman	53	SMA	Danarto
4	Yohanes Deby W.S	35	SMA	Tata Laksana
5	Sugeng	52	SMA	Wkl Ketua BPKal
6	Arni	28	SMA	Pelaku UMKM
7	Arin	30	SMA	Pelaku UMKM
8	Yuni Arianti	26	SMA	Pelaku UMKM
9	Erma	33	SMA	Pelaku UMKM
10	Susanto	35	SMA	Tokoh Masyarakat
11	Yanti	41	SMA	Tokoh Masyarakat
12	Sarminah	38	SMA	Tokoh Masyarakat

Sumber: Data Primer

3. Teknik Pengumpulan Data

Dalam mengungkapkan atau menjangring berbagai fenomena, informasi atau kondisi di lokasi penelitian peneliti menggunakan beberapa teknik pengumpulan data sebagai berikut:

a. Observasi

Observasi merupakan aktivitas mencari tahu secara langsung atau mengamati fenomena sosial yang terjadi dilapangan. Menurut Margono (2007) observasi merupakan teknik melihat dan mengamati perubahan

dari fenomena sosial yang tengah berkembang dan tumbuh. Selanjutnya perubahan bisa dilakukan berdasarkan penilaian tersebut. Sedangkan menurut Supriyati (2011: 46) observasi merupakan suatu metode yang digunakan untuk mengumpulkan data penelitian dengan mempunyai sifat dasar naturalistik yang berlangsung dalam konteks natural, pelakunya berpartisipasi secara wajar dalam interaksi. Dalam hal ini tujuan observasi mencari tahu dan mengamati serta mengumpulkan fakta mengenai kejadian atau fenomena yang terjadi dilapangan. Dalam konteks ini peneliti hendak mencari tahu dan mengumpulkan fakta yang berkaitan dengan Bagaimana terbentuknya Desa Preneur.

b. Wawancara Mendalam (*in-depth interview*)

Pengertian wawancara adalah percakapan terstruktur di mana pewawancara bertanya pertanyaan, dan narasumber menjawab. Pewawancara mengajukan pertanyaan yang ditanggapi oleh orang yang diwawancarai, biasanya memberikan informasi. Informasi tersebut dapat digunakan atau diberikan kepada audiens lainnya.

Menurut P. Joko Subagyo (2011: 39) wawancara adalah suatu aktivitas yang dilakukan untuk memperoleh informasi secara langsung dengan mengungkapkan pertanyaan-pertanyaan pada responden. Wawancara dapat berarti berhadapan langsung antara interview dengan responden dan kegiatan tersebut dilakukan secara lisan.

Dalam hal ini, wawancara adalah kegiatan mencari informasi secara langsung dengan mengajukan pertanyaan kepada responden mengenai suatu hal yang hendak diteliti. dalam penelitian ini peneliti hendak

mewawancarai beberapa informan yang berkaitan dengan Bagaimana pengembangan Desa Preneur.

c. Dokumentasi

Menurut Suharsimi Arikunto (2014) Metode dokumentasi adalah mencari data tentang hal-hal atau variabel yang berupa catatan, transkrip, buku, surat kabar, majalah, notulen rapat, agenda dan lain sebagainya.

Dalam hal ini peneliti akan mengumpulkan dokumen-dokumen yang menunjang penelitian yaitu foto-foto agenda bersama pemerintah desa, arsip-arsip Desa Preneur, kebudayaan, monografi dan demografi desa dan lain-lain.

4. Teknik Analisis Data

Setelah semua data terkumpul maka tahap selanjutnya dilakukan analisis dengan menggunakan teknik analisis Miles dan Huberman dalam Sugiyono (2008: 91-99). Dalam analisis ini dilakukan secara interaktif dan berlangsung secara terus menerus sampai tuntas. Aktivitas dalam analisis data ini yaitu dengan merangkum, memilih hal-hal pokok, mengelompokkan dan memfokuskan pada hal-hal yang penting untuk dicari tema dan polanya (data reduction). Dari berbagai data yang telah terkumpul dapat dikelompokkan beberapa data pokok dari penelitian ini yakni: gambaran umum Kalurahan Karangawen, gambaran umum pembangunan kalurahan Karangawen (fisik dan non-fisik), peran pemerintah, peran masyarakat, faktor pendukung dan penghambat. Setelah dikelompokkan, data disajikan dalam sebuah pola yang sesuai dengan kajian (data display). Data disajikan sesuai dengan rumusan

masalah. Dalam penelitian ini penyajian data dilakukan dengan membandingkannya dengan teori yang ada serta kajian penelitian terdahulu. Setelah itu ditarik sebuah kesimpulan yang menghasilkan sebuah hipotesis dan deskripsi atau gambaran suatu objek yang sebelumnya masih remang-remang atau gelap menjadi jelas (*conclusion drawing*) atau (*verification*). Untuk menganalisa berbagai fenomena di lapangan setelah semua data terkumpul, langkah selanjutnya dapat dilihat dari penjelasan lebih rinci sebagai berikut:

a. Pengumpulan Data (*Data Collection*)

Untuk memperoleh data yang diperlukan sebagai landasan dalam penelitian maka penulis melakukan pengumpulan data dari lapangan dengan menggunakan 4 metode, yaitu:

- 1) Observasi adalah suatu proses pengamatan langsung tentang apa yang terjadi dilapangan, sehingga penulis dapat memperkuat data yang ada.
- 2) Kuesioner adalah suatu teknik pengumpulan data dengan cara menyediakan daftar pertanyaan yang akan penulis ajukan pada responden.
- 3) Wawancara digunakan sebagai teknik pengumpulan data apabila peneliti ingin melakukan studi pendahuluan untuk menemukan permasalahan yang harus diteliti. Teknik pengumpulan data ini mendasarkan diri pada pengetahuan dan keyakinan pribadi. Wawancara dapat dilakukan secara terstruktur maupun tidak terstruktur, dan dapat dilakukan melalui tatap muka (*face to face*) maupun menggunakan telepon.

- 4) Dokumentasi adalah teknik pengumpulan data dengan mengumpulkan berbagai dokumen yang ada.

b. Reduksi Data

Reduksi data merupakan proses pemilihan, pemusatan perhatian pada penyederhanaan, transformasi data kasar yang muncul dari catatan lapangan. Langkah ini bertujuan untuk memilih informasi mana yang sesuai dan tidak sesuai dengan masalah penelitian (Moleong, 2000: 288).

Menurut S. Nasution (1992:129) dalam bukunya yang berjudul Metode Penelitian Naturalistik bahwa reduksi data adalah merangkum, memilih hal-hal pokok, memfokuskan pada hal-hal yang penting, mencari tema polanya, sehingga data lebih mudah untuk dikendalikan. Sedangkan menurut Sugiyono (2008: 101) reduksi adalah proses merangkum, memilih hal-hal yang pokok, memfokuskan hal-hal yang penting, dicari tema dan polanya dan membuang yang tidak perlu. Proses reduksi data dimulai setelah melakukan wawancara dengan informan penelitian.

Proses ini dimulai dengan membuat transkrip hasil wawancara dengan cara memutar kembali rekaman hasil wawancara, mendengarkan dengan seksama, kemudian menuliskan kata-kata yang didengar sesuai dengan apa yang ada direkaman tersebut. Setelah peneliti menulis hasil wawancara tersebut kedalam transkrip, selanjutnya peneliti membaca secara cermat untuk kemudian dilakukan reduksi data. Peneliti membuat

reduksi data dengan cara membuat abstraksi, yaitu mengambil dan mencatat informasi-informasi yang bermanfaat sesuai dengan konteks penelitian atau mengabaikan kata-kata yang tidak perlu sehingga didapatkan inti kalimatnya saja, tetapi bahasanya sesuai dengan bahasa informan.

Abstraksi yang sudah dibuat dalam bentuk satuan-satuan kemudian dikelompokkan berdasarkan tema-tema utama (*domain*) yang sesuai dengan penelitian. Analisis Domain menurut Sugiyono (2008: 255) adalah proses untuk memperoleh gambaran yang umum dan menyeluruh dari obyek/penelitian atau situasi sosial. Peneliti memperoleh domain ini dengan cara melakukan pertanyaan grand dan miniatour. Dalam penelitian ini, pengelompokan data didapat untuk mengetahui lebih dalam peran pemerintah kalurahan karangawen dalam mewujudkan Desa Preneur.

BAB II

PROFIL KALURAHAN KARANGAWEN

A. Kondisi Geografis

Kalurahan Karangawen merupakan salah satu Kalurahan di Kapanewon Girisubo, yang terletak 40 km sebelah Tenggara Kota Wonosari Gunungkidul. Secara geografis Kalurahan Karangawen berada pada 8°8' LS-8°09' LS dan 110°43' BT-110°45' BT, dengan luas wilayah 625,2573 ha atau merupakan Kalurahan yang paling kecil di wilayah Kapanewon Girisubo. Batas wilayah Kalurahan Karangawen dapat dirinci sebagai berikut:

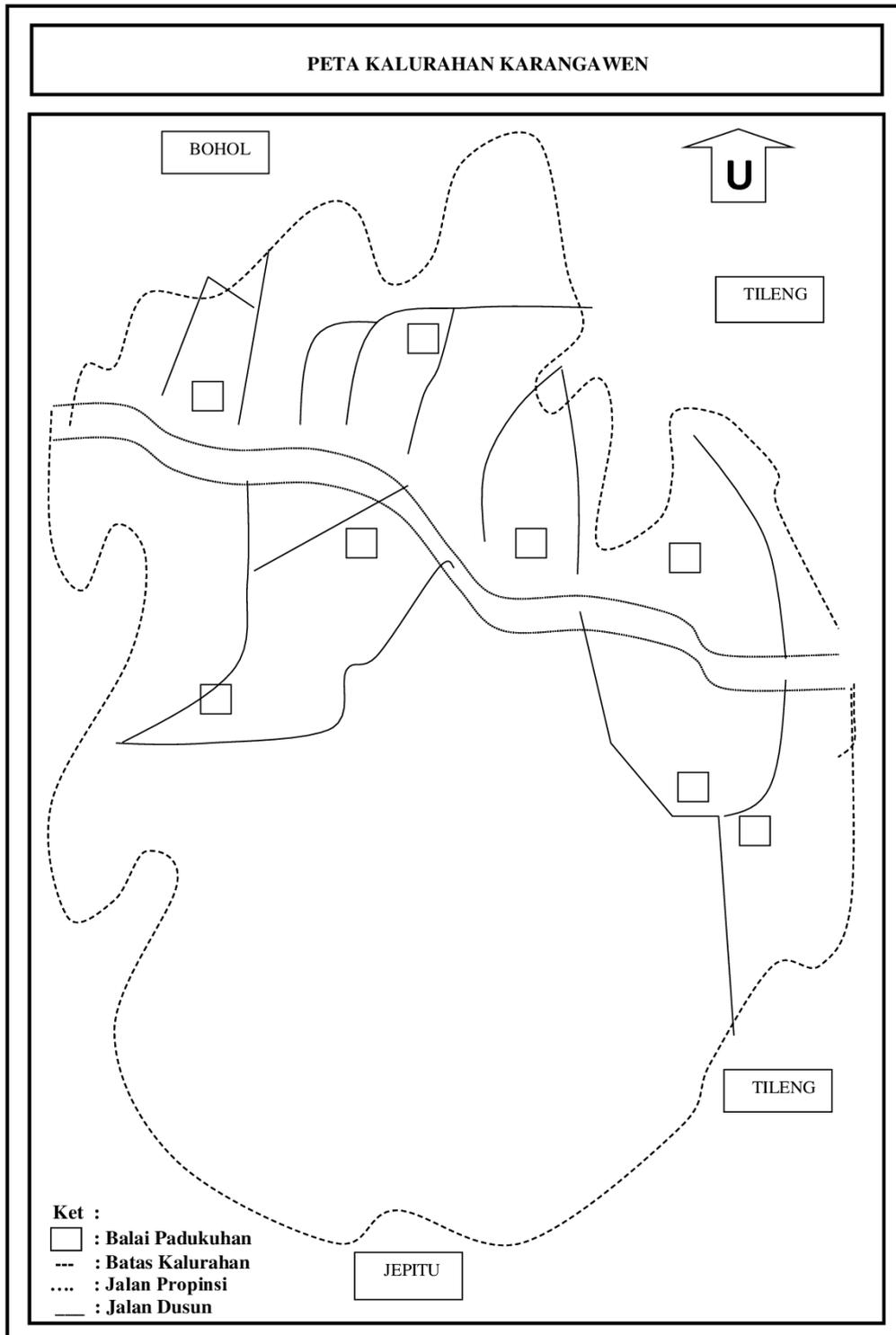
- a. Sebelah Barat berbatasan dengan Kalurahan Jepitu Kapanewon Girisubo.
- b. Sebelah Utara berbatasan dengan Kalurahan Jepitu Kapanewon Girisubo dan Kalurahan Bohol Kapanewon Rongkop.
- c. Sebelah Timur berbatasan dengan Kalurahan Tileng Kapanewon Girisubo.

d. Sebelah Selatan berbatasan dengan Kalurahan Tileng dan Kalurahan Jepitu Kapanewon Girisubo.

Berdasarkan kondisi topografi Kalurahan Karangawen merupakan Zona Selatan Kabupaten Gunungkidul, yang dalam RPJMD Kabupaten disebut wilayah pengembangan Gunung Seribu (*Duizon gebergton* atau *Zuider gebergton*), dengan ketinggian 0m – 300 MDPL di atas permukaan laut. Batuan dasar pembentuknya adalah batu kapur dengan ciri khas bukit-bukit kerucut (*Conical limestone*) dan merupakan kawasan karst.

Lahan di Kalurahan mempunyai tingkat kemiringan yang bervariasi. Curah hujan rata-rata sebesar 1954,43 mm/thn dengan jumlah hari hujan rata-rata 89 hari. Bulan basah 4–5 bulan, sedangkan bulan kering berkisar antara 7–8 bulan. Musim hujan dimulai pada bulan Oktober–Nopember dan berakhir pada bulan Maret–April setiap tahunnya. Puncak curah hujan dicapai pada bulan Desember – Pebruari. Suhu udara untuk suhu rata-rata harian $27,7^{\circ}\text{C}$, suhu minimum $18,2^{\circ}\text{C}$ dan suhu maksimum $33,4^{\circ}\text{C}$. Potensial untuk tanaman lahan kering (padi gogo dan palawija), tanaman buah-buahan (pisang, srikoyo, sirsat, dll), budidaya perikanan perairan darat (telaga) dan perikanan tangkap serta untuk usaha budidaya ternak (penggemukan).

Gambaran wilayah secara administratif dapat dilihat pada gambar sebagai berikut:



Sumber: Profil Kalurahan Karangawen 2021

B. Perekonomian Kalurahan

Pertumbuhan ekonomi Kalurahan Karangawen lebih rendah dibandingkan dengan pertumbuhan ekonomi Kapanewon Girisubo. Hal itu menunjukkan bahwa perekonomian di Kalurahan Karangawen berkembang relatif lebih lambat dibanding Kalurahan lain di wilayah Kapanewon Girisubo. Namun demikian, ternyata laju pertumbuhan ekonomi Kalurahan ini lebih tinggi dibanding laju pertumbuhan penduduknya, terlihat dari PDRB perkapita menurut harga konstan Kalurahan ini yang selalu menunjukkan perkembangan yang semakin meningkat selama periode 2022 - 2027. Pada tahun 2022 - 2027 PDRB perkapita atas dasar harga konstan tercatat berturut-turut sebesar Rp 1,90 juta, Rp 1,99 juta, Rp 1,80 juta, Rp 2,04 juta dan 2,17 juta .

Dilihat dari struktur ekonomi, menunjukkan bahwa penyumbang utama perekonomian Kalurahan Karangawen selama kurun waktu 2022 - 2027 masih didominasi oleh sektor pertanian, diikuti sektor jasa, sektor perdagangan, dan sektor industri pengolahan. Pada tahun 2015 sumbangan keempat sektor tersebut masing-masing sebesar 66,38 persen; 15,54 persen; 13,17 persen dan 3,2 persen. Sektor pertanian, sebagai penyumbang terbesar dalam perekonomian Kalurahan Karangawen, ternyata selama kurun waktu 2022 - 2027 kontribusinya cenderung fluktuatif yakni sebesar; 66,38 persen; 55,39 persen, 57,47 persen, 58,40 persen, 58,07 persen dan 58,02 persen. Berdasarkan data di atas, jika ekonomi tumbuh secara wajar maka sektor industri pengolahan, sektor perdagangan, serta sektor jasa akan tumbuh pesat dibandingkan dengan sektor pertanian yang merupakan resourced-based economic. Dengan demikian secara alami andil sektor pertanian

akan menurun secara gradual seiring berkembangnya dinamika perekonomian Kalurahan.

Tabel 2. 1. Pertumbuhan Ekonomi per Sektor Tahun 2016 – 2021

No	Sektor	2016	2017	2018	2019	2020	2021
1	Pertanian	5,35	5,13	0,41	5,27	5,91	6,05
2	Industri kecil	3,12	2,61	1,43	1,37	1,21	1,53
3	Perdagangan,	3,76	2,38	9,04	4,34	4,43	4,56
4	Pengangkutan	5,06	4,53	7,93	3,67	3,48	4,01
5	Jasa	3,29	2,91	3,70	3,07	2,20	3,01
Pertumbuhan Ekonomi		4,33	3,82	3,91	4,39	4,20	4,75

Sumber: Profil Kalurahan Karangawen Tahun 2022

Pertumbuhan ekonomi Kalurahan Karangawen sampai dengan tahun 2021 masih di dominasi oleh kegiatan ekonomi kelompok sektor primer yaitu sektor pertanian dan penggalian, disusul kelompok sektor tersier, baru kelompok sektor sekunder. Hal ini menunjukkan bahwa kegiatan ekonomi belum mampu berkembang secara optimal kearah pengembangan sektor industri dan pengolahan, dengan demikian sektor pertanian masih menjadi tumpuan mata pencaharian masyarakat secara umum. Hal ini mengisyaratkan bahwa perencanaan kedepan tidak boleh mengesampingkan program-program pembangunan pertanian. Kebijakan untuk mendorong perekonomian bergeser ke sektor industri dan pengolahan lebih ditekankan kepada kesiapan bahan baku yang berbasis produk pertanian, kesiapan sumber daya manusia, dan persiapan jaringan pemasaran. Hal ini penting untuk diperhatikan mengingat kegiatan yang berbasis kepada industri kecil, pengolahan, sektor perdagangan, dan sektor jasa akan mampu memberikan nilai tambah yang signifikan dibanding jika perekonomian Kalurahan bertumpu

kepada kegiatan penyediaan bahan baku saja (resourced-based economic), dengan demikian secara alami andil sektor pertanian akan menurun secara gradual seiring berkembangnya dinamika perekonomian.

Sektor Pertanian

Meskipun Kalurahan Karangawen dikenal gersang, tetapi produksi komoditas pertanian tanaman pangan dan palawija mengalami surplus dan tidak pernah mendatangkan dari luar Kalurahan maupun luar daerah yang berarti telah berhasil mencapai swasembada pangan. Produksi tanaman padi terutama padi gogo lahan kering berhasil meningkat sehingga surplus gabah.

Kenaikan produksi berbagai tanaman pangan tersebut sebagai akibat adanya kepedulian dan kesungguhan dari semua pemangku kepentingan terhadap pentingnya ketersediaan bahan pangan yang mencukupi serta upaya pembangunan pertanian yang intensif. Selain dukungan dari pemerintah pusat hingga Kalurahan, faktor penting lain yang berpengaruh terhadap keberhasilan tersebut adalah adanya semangat dan partisipasi masyarakat petani yang sangat besar dalam pembangunan pertanian.

Sektor Kehutanan

Luas wilayah hutan yang terdapat di Kalurahan Karangawen seluas 155 Ha , yang mana secara keseluruhan hutan yang ada adalah lahan milik warga masyarakat, hal tersebut dapat dilihat sebagaimana dibawah ini:

Tabel 2. 2. Luas Wilayah Hutan

NO	NAMA DUSUN	LUAS HUTAN RAKYAT (Ha)	LUAS HUTAN RAKYAT Yang sudah diinventariskan
1	2	3	4
1	KEPUH	25	-
2	BANDUNG	15	-
3	TLASIH	15	-
4	LANGSEP	25	-
5	POKAK	25	-
6	TEGALREJO	15	-
7	KARANGAWEN	20	-
8	NGAGLIK	15	-

Sumber: Data Profil Kalurahan Karangawen Tahun 2022

Secara rinci, hutan rakyat yang ada ditanami tanaman kayu jati, akasia dan pule dengan tanaman campuran pakan ternak yakni kleresede dan lamtoro. Sehingga keberadaan hutan rakyat di Kalurahan Karangawen memiliki peranan dan kedudukan yang penting dan unik. Di satu sisi, hutan rakyat itu sejak lama merupakan hutan produksi yang menghasilkan komoditas kehutanan, yang memiliki arti penting bagi perolehan pendapatan dan juga sebagai tandon pakan ternak. Di sisi yang lain, keberadaan hutan rakyat di Kalurahan Karangawen berkaitan dengan upaya pemerintah untuk menghidupkan kembali lahan kritis yang ada di wilayah ini.

Selain itu sasaran usaha rehabilitasi lahan kritis terutama ditujukan pada lahan pekarangan milik penduduk, berbagai potensi kehutanan dan perkebunan dapat dikembangkan, dengan beberapa hasil komoditas kehutanan seperti kayu jati, mahoni, sonokeling, bambu, akasia, dan sebagainya. Dari hutan rakyat itu

pula beberapa komoditas perkebunan dapat dihasilkan seperti kelapa, mlinjo, sukun, mangga, dan sebagainya.

Komoditas kehutanan yang dihasilkan di Kalurahan Karangawen antara lain jati, mahoni, akasia, sonokeling, bambu, dan arang. Komoditas yang paling besar produksinya adalah jati, akasia, dan bambu. Selain itu peran hutan dan lahan yang paling besar di Kalurahan Karangawen adalah sebagai lahan untuk menanam Pakan ternak dan itu yang membedakan dan menjadi spesifikasi dibandingkan dengan Kalurahan-Kalurahan yang lain.

Perkebunan

Selama kurun waktu tahun 2016 - 2021 produksi komoditas perkebunan mengalami fluktuasi produksi yang beragam, akan tetapi peran dari perkebunan di Kalurahan Karangawen kurang begitu dominan, hal ini disebabkan oleh dua hal, yakni ketersediaan/luas lahan yang sempit dan kebanyakan dipergunakan untuk lahan tanaman Pakan ternak. Pada tahun 2021, setiap komoditas mengalami perubahan produksi yang berbeda-beda. Secara rinci untuk produksi Kelapa 324 ton. Untuk Mlinjo produksinya mencapai 152 ton, dan produk-produk perkebunan yang lain yang rendah, diantaranya mangga, pete, jeruk, pisang dan lain-lain.

Sektor Perikanan dan Kelautan

Kalurahan Karangawen merupakan Kalurahan di wilayah pesisir pantai selatan akan tetapi tidak memiliki pantai atau tidak berbatasan langsung dengan laut, disamping itu Kalurahan Karangawen merupakan Kalurahan yang rawan

kekeringan, akan tetapi produk perikanan tetap dapat dikembangkan didalam kolam-kolam terpal dan ditelaga Karang kidul.

Sektor Peternakan

Produksi di sub sektor peternakan dari tahun 2016 - 2021 menunjukkan perkembangan yang positif. Berdasarkan penilaian dari berbagai pihak menyatakan bahwa Kalurahan Karangawen adalah gudang ternak dan budaya masyarakat petani untuk memelihara ternak turut memberikan andil dalam peningkatan populasi ternak. Satu hal yang menjadi spesifikasi dibanding Kalurahan yang lain adalah bahwa hewan ternak dikembang biakkan dilahan pertanian dalam kondisi dibiarkan hujan keujanan dan panas tetap kepanasan artinya tidak dibuatkan kandang. Hal ini membuat produk ternak terutama dagingnya berbeda dan lebih baik (alami).

Tabel 2. 3. Perkembangan Populasi Ternak di Kalurahan Karangawen

No	Jenis Ternak	Tahun (Ekor)					
		2016	2017	2018	2019	2020	2021
1	Sapi Potong	602	654	548	791	789	801
2	Kambing	845	982	654	1208	1352	1400
3	Ayam Buras	883	898	546	1023	1140	1100

Sumber: Data Profil Kalurahan Karangawen Tahun 2022

C. Sektor Perindustrian, Perdagangan, Koperasi, dan Pertambangan

Sektor Perindustrian

Berdasarkan data terakhir perkembangan industri kecil dan mikro di Kalurahan Karangawen terus mengalami peningkatan, sebagaimana pada tabel. Industri kecil dan mikro ini berbasis pada hasil kehutanan.

Tabel 2. 4. Data Industri Kecil Menengah di Kalurahan Karangawen

No	Jenis	TAHUN				
		2017	2018	2019	2020	2021
1	Industri Kecil Mikro					
	a. Unit Usaha	12	16	18	18	18
	b. Tenaga Kerja (Org)	49	56	65	65	66
	c. Nilai Produksi (Rp)	39.506.261	40.409.000	44.434.000	45.000.000	45.250.000
	d. Nilai Investasi (Rp)	75.815.000	73.344.000	75.216.000	75.500.000	75.750.000
2.	Perdagangan					
	a. Kecil	13	13	13	18	21

Sumber: Data Profil Kalurahan Karangawen Tahun 2022

Permasalahan utama yang dihadapi oleh Industri Kecil Rumah Tangga (IKRT) adalah masalah pemasaran (44%), permodalan (38,7%), lainnya (10,5%), bahan baku (3,7%), dan distribusi dan transportasi (3,1%). IKRT Kalurahan Karangawen dalam kegiatan produksinya mengandalkan atau memanfaatkan potensi sumber daya lokal seperti produk-produk pertanian, dan perkebunan.

Melihat pentingnya IKRT bagi Kalurahan Karangawen dalam berbagai hal dan masih banyaknya masalah terkait IKRT di Kabupaten ini, maka perlu disusun

suatu langkah strategis bertahap yang mampu mengembangkan IKRT agar mampu menyokong dan meningkatkan pertumbuhan PDRB dan menyerap tenaga kerja.

Sektor Koperasi

Koperasi pada saat ini cenderung melemah dan lesu karena greget dari pemerintah pusat terhadap koperasi kurang terasa, tidak seperti pada masa-masa orde baru. Hal ini bukan berarti pemerintah saat ini tidak mengedepankan koperasi akan tetapi karena kebijakan-kebijakan perekonomian global seperti halnya AFTA China dan lain sebagainya. Padahal koperasi mempunyai kebijakan mengedepankan asas kekeluargaan sehingga dalam bersaing terutama diluar koperasi bahkan ke tingkat mancanegara perlu pembenahan dan peningkatan sumber daya manusia.

Sampai saat ini koperasi di Kalurahan Karangawen menginduk menjadi satu dengan koperasi yang ada di Kapanewon Rongkop, sementara Koperasi yang ada di Kalurahan Karangawen belum ada dan yang ada adalah kelompok-kelompok simpan pinjam baik ditingkat Kalurahan maupun Padukuhan, satu diantaranya UED SP ditingkat Kalurahan dan juga kelompok-kelompok IDT, kelompok ternak, kelompok tani dan BUMKalurahan yang diampu oleh Gapoktan Tani Gemilang. Berikut disampaikan data sebagaimana dimaksud:

Tabel 2. 5. Data Kelompok Tani Berbasis Padukuhan

NO	NAMA KELOMPOK TANI	PADUKUHAN	JUMLAH PETANI	JUMLAH ANGGOTA
1	TANI GEMILANG	GAPOKTAN	970	970
2	SIDO MUKTI	KEPUH	51	43
3	RUKUN MULYO	BANDUNG	57	42
4	NGUDI TANI	TLASIH	50	49
5	MEKAR SARI	LANGSEP	39	39
6	PUJI LESTARI	POKAK	97	92
7	MAKMUR	TEGALREJO	63	59
8	SARI TANI	KRAWEN	29	35
9	SEDYO MULYO	NGAGLIK	44	32

Sumber: Data Profil Kalurahan Karangawen Tahun 2022

Tabel 2. 6. Data Kelompok Ternak

NO	NAMA KELOMPOK	PADUKUHAN	JUMLAH PETANI	JUMLAH ANGGOTA
1	NGUDI BOGA	KEPUH	51	43
2	NGUDI RUKUN	BANDUNG	57	42
3	NGUDI TANI	TLASIH	50	49
4	MAJU	LANGSEP	39	39
5	SEDYO RUKUN	POKAK	97	92
6	SEDYO MULYO	TEGALREJO	63	59
7	SIDO MAJU	KARANGAWEN	29	35
8	SEDYO MULYO	NGAGLIK	44	32

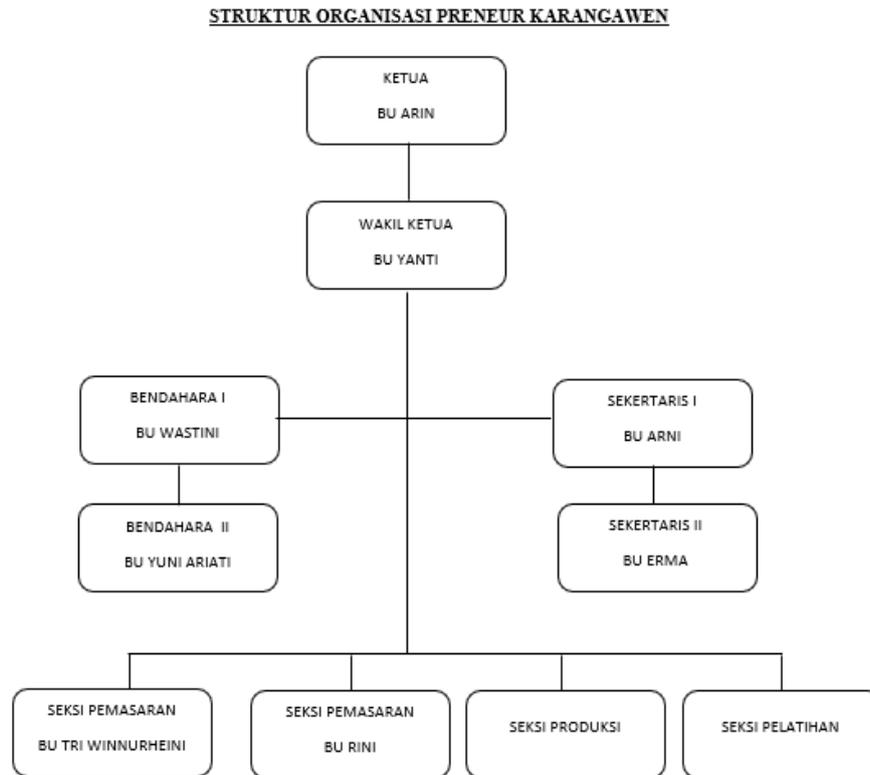
Sumber: Data Profil Kalurahan Karangawen Tahun 2022

Tabel 2. 7. Jenis UMKM di Kalurahan Karangawen

No	Jenis UMKM/ Klasifikasi Usaha	Jumlah
1	Usaha Kuliner	31 Pelaku
2	Usaha Konstruksi (Mebel)	3 Pelaku
3	Usaha Warung Kelontong	17 Pelaku
Total		51 Pelaku

Sumber: Data diolah peneliti dari data UMKM Karangawen 2023

Tabel 2. 8. Struktur Organisasi Preneur Karangawen



Sumber: Data Penelitian 2023

D. Sosial dan Budaya

Kependudukan

Jumlah Kepala Keluarga yang ada di Kalurahan Karangawen adalah 535 kk dengan perincian sebaga berikut:

Tabel 2. 9. Tingkat Kesejahteraan Keluarga di Kalurahan Karangawen

No	Jenis KK	Jumlah KK
1	Prasejahtera	190
2	Prasejahtera 1	131
3	Prasejahtera 2	124
4	Prasejahtera 3	53
Jumlah KK		535

Sumber: Data Profil Kalurahan Karangawen Tahun 2022

Jika dilihat dari komposisinya, jumlah penduduk perempuan dari tahun 2016 sampai 2021 selalu lebih tinggi dari pada jumlah penduduk laki-laki. Komposisi tersebut ditunjukkan dengan rasio jenis kelamin yang pada periode tersebut berkisar antara 95 sampai 97. Tingkat kepadatan penduduk Kalurahan Karangawen pada tahun 2020 adalah 641 jiwa/km².

Tabel 2. 10. Perkembangan Jumlah Penduduk Kalurahan Karangawen

No	Tahun	Jumlah Penduduk	Laki-Laki	%	Perempuan	%
1	2016	1610	769	47,76	841	52,24
2	2017	1663	810	48,70	853	51,30
3	2018	1675	812	48,47	863	51,53
4	2019	1662	810	49,03	852	50,97
5	2020	1646	805	48,90	841	51,10
6	2021	1570	772	49,17	798	50,83

Sumber: Data Profil Kalurahan Karangawen Tahun 2022

Berdasarkan kelompok umur penduduk, sekitar 66,48 % merupakan penduduk usia produktif, sedangkan sisanya adalah kelompok umur muda dan umur tua yang secara teori menjadi beban kelompok usia produktif.

E. Pendidikan

Pendidikan merupakan salah satu pilar terpenting dalam meningkatkan kualitas sumber daya manusia, oleh karena itu pembangunan di bidang pendidikan harus mampu menjamin pemerataan kesempatan pendidikan, peningkatan mutu yang relevan dengan kondisi dan dinamika yang ada, untuk mewujudkan efisiensi manajemen pendidikan.

Untuk menggambarkan kondisi pendidikan Kalurahan Karangawen dapat dilihat dari beberapa indikator tingkat partisipasi sekolah. Angka Partisipasi Murni (APM) penduduk di Kalurahan Karangawen pada tahun 2021 adalah sebagaimana digambarkan pada tabel tersebut dibawah ini:

Tabel 2. 11. Tingkat Pendidikan Penduduk Kalurahan Karangawen

No	Tingkat Pendidikan	Jumlah
1	Tidak tamat SD/ sederajat	419
2	Tamat SD	554
3	Tamat SLTP/ sederajat	300
4	Tamat SLTA/ sederajat	208
5	Tamat D1-D3	20
6	Tamat S1	59
	Jumlah	1.560 Jiwa

Sumber: Data Profil Kalurahan Karangawen Tahun 2022

Penyelenggaraan pendidikan tidak terlepas dari kondisi sarana dan prasarana pendidikan yaitu gedung sekolah. Berikut disajikan data gedung sekolah menurut jenjang pendidikan dengan yang terdapat di Kalurahan Karangawen, sebagaimana tersebut dibawah ini:

Tabel 2. 12. Data Ruang/Kelas Sekolah dan Jumlah Guru Yang ada di Kalurahan Karangawen

NO	JENJANG PENDIDIKAN	JML KELAS	JML GURU	Alamat
1	Paud Putra Bangsa	1 Unit	3 org	Pokak
2	TK Aba Xx1	1 Unit	2 org	Pokak
3	TK Ariwacana	1 Unit	2 org	Kepuh
4	SD Bopkri Kr Awen	6 Unit	11 org	Kepuh

Sumber: Data Profil Kalurahan Karangawen Tahun 2022

F. Kemiskinan

Tujuan pembangunan adalah meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Tetapi seiring dengan kemajuan dan keberhasilan pembangunan, masih ada sebagian masyarakat yang kurang atau tidak bisa menikmati hasil pembangunan tersebut karena berbagai hal, mereka adalah kelompok masyarakat miskin. Kemiskinan merupakan suatu kondisi dimana anggota masyarakat tidak/belum ikut serta dalam proses perubahan karena tidak mempunyai kemampuan baik dalam kepemilikan faktor produksi maupun kualitas faktor produksi yang memadai sehingga tidak mendapatkan manfaat dari hasil proses pembangunan.

Angka kemiskinan di Kalurahan Karangawen dengan pendekatan Rumah Tangga Sasaran menunjukkan bahwa pada tahun 2016 terdapat 227 rumah tangga miskin dan tahun 2017 menjadi 163 rumah tangga miskin. Angka kemiskinan di Kalurahan Karangawen pada tiap-tiap Padukuhan dapat dilihat pada berikut ini:

Tabel 2. 13. Angka Kemiskinan Tahun 2016 – 2021 (Pendekatan Satuan Rumah Tangga Sasaran)

No.	Padukuhan	Tahun					
		2016	2017	2018	2019	2020	2021
1	KEPUH	38	34	36	34	35	36
2	BANDUNG	47	40	42	44	37	43
3	TLASIH	45	43	44	45	38	35
4	LANGSEP	37	36	38	36	26	44
5	POKAK	65	65	66	67	45	60
6	TEGALREJO	45	45	46	47	34	43
7	KARANGAWEN	30	29	28	25	21	26
8	NGAGLIK	20	18	16	20	15	14

Sumber: Data Profil Kalurahan Karangawen Tahun 2022

Meskipun persentase penduduk miskin dari tahun ke tahun mengalami penurunan, namun masih diperlukan kebijakan pemerintah untuk mengurangi tingkat kemiskinan. Kebijakan yang dilakukan antara lain dengan cara peningkatan akses pelayanan pendidikan, kesehatan, jaminan sosial, peningkatan pendapatan, dan air bersih bagi penduduk miskin serta perluasan lapangan kerja di berbagai sektor.

Peningkatan akses pelayanan pendidikan dapat dilakukan melalui kegiatan pemberian beasiswa bagi siswa miskin, penyediaan dana Bantuan Operasional Sekolah (BOS), Kartu Indonesia Pintar (KIP), dan penyediaan sarana dan prasarana sekolah. Peningkatan akses pelayanan bidang kesehatan dapat dilakukan dengan pelayanan kesehatan gratis bagi penduduk miskin berupa Kartu

Indonesia Sehat (KIS) atau BPJS Kesehatan, peningkatan sarana dan prasarana pelayanan kesehatan dasar, penanganan masalah gizi buruk, dan penyediaan air bersih bagi penduduk miskin.

Pembangunan akan disebut berhasil jika jumlah masyarakat miskin relatif sedikit dan mereka mampu mengakses kebutuhan dasar secara mudah dan murah. Selain itu juga pendapatan dapat terdistribusi secara merata dan tidak menumpuk pada sekelompok masyarakat tertentu.

G. Data Penduduk Berdasarkan Mata Pencaharian

Tingkat pertumbuhan angkatan kerja yang cepat dan pertumbuhan lapangan kerja yang relatif lambat menyebabkan masalah pengangguran di suatu Kalurahan. Pengangguran di Kalurahan Karangawen masih menjadi masalah yang perlu diselesaikan. Dalam pembahasan ini penduduk usia kerja (tenaga kerja) didefinisikan sebagai penduduk yang berumur 15 tahun ke atas. Penduduk Usia Kerja terdiri dari Angkatan Kerja dan Bukan Angkatan Kerja. Mereka yang termasuk dalam Angkatan Kerja adalah penduduk yang bekerja atau yang sedang mencari pekerjaan, sedangkan Bukan Angkatan Kerja adalah mereka yang bersekolah, mengurus rumah tangga atau melakukan kegiatan lainnya.

Tabel 2. 14. Tabel Ketenagakerjaan Kalurahan Karangawen

No	Uraian	TAHUN					
		2016	2017	2018	2019	2020	2021
1	Penduduk Usia Kerja (15 Th	1244	1241	1247	1255	1244	1262

No	Uraian	TAHUN					
	ke Atas)						
2	Angkatan Kerja						
	a. Bekerja	1219	1223	1227	1230	1217	1228
	b. Pengangguran Terbuka	25	18	20	25	20	0
3	Bekerja Menurut Lapangan Usaha						
	a. Pertanian	1091	1087	1085	1081	1075	1073
	b. Industri Pengolahan	33	41	48	43	46	47
	c. Wiraswasta	39	40	48	49	48	51
	d. Jasa-Jasa	10	7	9	8	9	8
	e. Lainnya	46	48	47	49	47	49

Sumber: Data Profil Kalurahan Karangawen Tahun 2022

Penduduk usia kerja dari tahun ke 2016- 2021 selalu mengalami kenaikan, pada tahun 2016 jumlah penduduk usia kerja sebanyak 1244 orang dan pada tahun 2017 jumlahnya mencapai 1241. Jumlah angkatan kerja pada tahun 2018 sebesar 1247. Selama kurun waktu tersebut sektor pertanian merupakan sektor yang menyerap tenaga kerja paling banyak. Tingkat pengangguran pada tahun 2018 sebesar 0 orang turun drastis dari tahun 2017 yang mencapai 25. Penurunan angka pengangguran terbuka tahun 2019 dibanding tahun 2018 diserap oleh sektor industri pengolahan dan wiraswasta.

Tabel 2. 15 Tabel Pelaku UMKM Dibidang Kuliner

NO	Jenis-Jenis Usaha Kuliner UMKM	Jumlah Pelaku UMKM
----	--------------------------------	--------------------

1	Peyek	14 Pelaku
2	Stik Bawang	4 Pelaku
3	Ketela Goreng	8 Pelaku
4	Pisang Goreng	6 Pelaku
Total		31 Pelaku

Sumber: Data Organisasi Desa Preneur Karangawen Tahun 2023

Berdasarkan tabel diatas dapat dilihat bahwa jumlah pelaku usaha umkm dibidang kuliner berjumlah 31 orang dengan 4 jenis makanan ringan. Hal ini tidaklah mengherankan dikarenakan kondisi sumber daya alam yang sangat mungkin untuk membantu para pelaku usaha umkm dalam melaksanakan kegiatan usaha.

H. Prasarana dan Sarana Kalurahan

Infrastruktur yang mendukung kegiatan sosial ekonomi, pemenuhan kebutuhan dasar masyarakat, dan pengembangan sentra produksi meliputi: jalan dan jembatan, irigasi dan prasarana permukiman (air bersih, drainase, dan sanitasi masyarakat). Kondisi infrastruktur di Kalurahan Karangawen adalah sebagai berikut:

Kondisi Jalan dan Jembatan Kabupaten

Jaringan jalan di Kalurahan Karangawen sepanjang 15,54 km dengan perincian menurut kewenangannya adalah jalan provinsi sepanjang 2,94 km dan jalan Kalurahan 13,60 km.

Kalurahan Karangawen dilalui oleh Jaringan Jalan Kolektor Primer sebagai Jalan Strategis sebagai Jalur Jalan Lintas Selatan (JJLS) yang direncanakan mencapai panjang 2,9 km, pembangunan jalan ini merupakan sharing anggaran antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Kabupaten dengan persentase 90:10.

Jaringan jalan di Kalurahan Karangawen sudah mampu menjangkau seluruh wilayah, hanya saja tidak semua ruas jalan dalam kondisi baik. Panjang ruas jalan sekitar 15,54 km, dengan kondisi baik sekitar 6,5 km, kondisi sedang sekitar 3,5 km, kondisi rusak ringan sekitar 5,14 km dan kondisi rusak berat sekitar 1,40 km.

Berdasarkan jenis perkerasannya dapat dibedakan menjadi 3 (tiga) yaitu: perkerasan aspal (AC/HRS), perkerasan makadam/ telford/kerikil dan perkerasan tanah.

Kondisi Perhubungan dan Transportasi

Kondisi perhubungan dan transportasi secara umum masih kurang. Hal ini dapat dilihat masih terbatasnya pelayanan transportasi umum baik yang dilakukan oleh swasta maupun pemerintah (perintis), bahkan dapat dikatakan Kalurahan Karangawen belum terlayani angkutan.

Kondisi pelayanan air bersih

Sumber air bersih di Kalurahan Karangawen berasal dari air permukaan khususnya Telaga dan Bak penampungan air hujan, serta mengadakan dengan tangki. Khusus untuk sistem perpipaan, pasokan air bersih belum dapat menjangkau wilayah Kalurahan.

Guna mencukupi kebutuhan air bersih dilakukan dengan beberapa hal di antaranya:

1. Pengembangan PAH (Penampungan Air Hujan)
2. Pengaktifan SR dari PDAM
3. Dropping air

Dropping air dilakukan dalam kondisi darurat yang biasanya dilakukan pada bulan Juni- Desember yang berasal dari bantuan baik dari pemerintah maupun swasta serta secara swadaya.

I. Pemerintahan Umum

Pemerintahan Kalurahan adalah pelaksanaan fungsi-fungsi pemerintahan Kalurahan yang dilakukan oleh lembaga pemerintahan Kalurahan yaitu Pemerintah Kalurahan dan Badan Permusyawaratan Kalurahan (Bamuskal). Dalam menjalankan roda pemerintahan Pemerintah Kalurahan memiliki fungsi ganda yaitu sebagai penyelenggara pemerintahan sekaligus sebagai penyelenggara utama dalam pembangunan di Kalurahan. Sebagai penyelenggara pemerintahan di Kalurahan berperan utama mengatur tatanan kehidupan bermasyarakat di Kalurahan dalam kerangka regulasi, sedangkan sebagai penyelenggara utama dalam pembangunan Kalurahan berperan sebagai pelaksana dan sebagai penanggungjawab utama dalam keseluruhan proses pembangunan yang dilaksanakan di Kalurahan yaitu dalam kerangka investasi dan penyediaan barang serta pelayanan publik.

Untuk meningkatkan kualitas pelayanan publik dalam era persaingan global yang menuntut efisiensi dan akurasi, pelayanan birokrasi yang cepat, murah dan berorientasi pada kebutuhan serta kepuasan klien sudah menjadi kebutuhan umum. Peningkatan pelayanan tersebut merupakan konsekwensi Penyelenggaraan desentralisasi sebagai salah satu asas mendasar dalam sistem penyelenggaraan pemerintahan Kalurahan mensyaratkan pembagian urusan pemerintahan antara pemerintah daerah dengan pemerintahan Kalurahan.

Organisasi Pemerintah Kalurahan Karangawen terdiri dari Lurah beserta Pamong Kalurahan yang terdiri atas Lurah, Carik, Kepala Bagian/Urusan, Staf dan Dukuh. Pamong Kalurahan dimaksud bertanggung jawab kepada Lurah dan membantu Lurah dalam penyelenggaraan pemerintahan.

BAB IV

KESIMPULAN DAN SARAN

A. Kesimpulan

1. Peran Pemerintah Kalurahan Karangawen dalam mewujudkan Kalurahan Karangawen sebagai salah satu Desa Preneur di Daerah Istimewa Yogyakarta adalah dengan sebagai fasilitator. Fasilitator yang menjembatani antara potensi yang ada di Kalurahan Karangawen yakni sumber daya manusia yang terhimpun sebagai pelaku UMKM dengan program Pemerintah Daerah Istimewa Yogyakarta melalui Desa Preneur. Desa Preneur di Kalurahan Karangawen masih di tahap rintisan ‘Pertumbuhan’.
2. Langkah – langkah yang dilakukan untuk mewujudkan desa preneuer di Kalurahan Karangawen adalah dengan cara melakukan pemetaan potensi, membentuk struktur kelembagaan, dan mengirimkan ke Dinas Koperasi dan UKM Kabupaten Gunungkidul untuk ditindaklanjuti dan pemberitahuan kepada Dinas Koperasi dan UKM Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta.
3. Kendala dalam mewujudkan Desa Preneur berada pada internal Pemerintah Kalurahan Karangawen sendiri, yakni kurang persiapan dan ketidakprofesionalan dengan bukti membuat struktur kelembagaan Desa Preneur tidak sesuai Peraturan Gubernur Nomor 20 Tahun 2022 tentang Petunjuk Teknis Pengembangan Desa Preneur. Selain itu juga masih terfokus pada perolehan Kalurahan Karangawen sebagai desa budaya.

B. SARAN

1. Pemerintah Kalurahan Karangawen harus terus memfasilitasi perwujudan Desa Preneur di Kalurahan Karangawen, seperti mengalokasikan Anggaran Pendapatan Belanja Desa (APBDes) untuk penumbuhkembangan desa preneur, pelatihan para pelaku UMKM, membuka bazar UMKM, dan lain sebagainya. Sehingga terbentuk dahulu sebagai Desa Preneur pertumbuhan dan terus berkordinasi dengan Dinas Koperasi dan UKM Kabupaten Gunungkidul dan Provinsi DIY dalam setiap aktivitas kegiatannya
2. Langkah selanjutnya yang bisa dilakukan adalah dengan memahami aturan terkait dengan Desa Preneur dan terus melakukan komunikasi terhadap Dinas Koperasi dan UKM Kabupaten Gunungkidul dan Provinsi DIY guna mewujudkan Desa Preneur. Sehingga sudah bukan lagi rintisan.
3. Memperbaiki kualitas sumber daya manusia di dalam pemerintahan Kalurahan Karangawen untuk bisa memahami aturan dan membuat strukrur kelembagaan Desa Preneur sekaligus memperbaiki persyaratan menjadi Desa Preneur dan melakukan komunikasi politik terhadap DPRD maupun Kepala Daerah ataupun pihak ketiga unruk dengar pendapat dan mengupayakan Kalurahan Karangawen sebagai Desa Preneur. Kemudian, menetapkan satu kefokuskan Kalurahan Karangawen itu untuk dijadikan Desa Preneur.

DAFTAR PUSTAKA

- Agung, A., Sita, A., Sari, M., Mekse, G., & Arisena, K. (2023). *Proses Pembentukan Dan Pengelolaan Badan Usaha Milik Desa (BUM Desa) Di Kabupaten Bangli*. 04(01), 1–26.
- Ali, K., & Saputra, A. (2020). Tata Kelola Pemerintahan Desa Terhadap Peningkatan Pelayanan Publik Di Desa Pematang Johar. *Warta Dharmawangsa*, 14(4), 602–614. <https://doi.org/10.46576/wdw.v14i4.891>
- Amanda, P. I. (2019). Kebijakan Publik (Teori, Analisis, Implementasi Dan Evaluasi Kebijakan). *TheJournalish: Social and Government*, 1, 34–38. <http://thejournalish.com/ojs/index.php/thejournalish/article/view/7>
- Andhika, L. R. (2019). Model Sistem Dinamis: Simulasi Formulasi Kebijakan Publik. *Jurnal Ekonomi Dan Kebijakan Publik*, 10(1), 73–86. <https://doi.org/10.22212/jekp.v10i1.1242>
- Ardyansyah, D. (2010). Kebijakan Publik sebagai Kebijakan Publik. *Jurnal MEDTEK*, 2(3), 78–91.
- Desa, D. I., Kecamatan, M., & Mayang, B. (2019). *Universitas Islam Negeri Raden Intan Lampung 1440 H / 2019 M Di Desa Mulyorejo 1 Kecamatan Bunga Mayang*.
- Desrinelti, D., Afifah, M., & Gistituati, N. (2021). Kebijakan publik: konsep pelaksanaan. *JRTI (Jurnal Riset Tindakan Indonesia)*, 6(1), 83. <https://doi.org/10.29210/3003906000>.
- Eko, S. (2021). Government Making: Membuat Ulang Ilmu Pemerintahan. *Governabilitas*, 2(1), 1-20.
- Fauzan, A. (2022). *Peran Badan Usaha Milik Desa (Bum Desa) Dalam Meningkatkan Perekonomian Masyarakat Di Desa Teluk Lecah Kecamatan Rupa Kabupaten Bengkalis*.
- Harsono, H. (2021). Potensi Pengembangan Pariwisata dan Kebudayaan Desa Tileng, Gunung Kidul, Yogyakarta di Situasi Pandemi Covid19. *Jurnal Atma Inovasia*, 1(2), 209–213. <https://doi.org/10.24002/jai.v1i2.3963>
- Imawan, A., Irianto, G., & Prihatiningtias, Y. W. (2019). Peran Akuntabilitas Pemerintah Desa Dalam Membangun Kepercayaan Publik. *Jurnal Akuntansi Multiparadigma*, 10(1). <https://doi.org/10.18202/jamal.2019.04.10009>

- Kusumawati, M. P., Hukum, F., Islam, U., Publik, K., & Publik, E. (2004). Pip3. *Encyclopedic Dictionary of Genetics, Genomics and Proteomics*, 6(1), 1–23. <https://doi.org/10.1002/0471684228.egp09588>
- Los, U. M. D. E. C. D. E. (n.d.). *HUKUM PEMERINTAHAN DESA*.
- Mardiyanti¹, Asrofi Lannggeng Noerman Syah², E. P. (2018). *Analisis Peran Badan Usaha Milik Desa (BUM Desa) Dalam Peningkatan Pendapatan Asli Desa Pada Desa Kepunduhan Kecamatan Kramat Kabupaten Tegal*. 1–8.
- Maulina. L Dkk., 2022. (2022). *Pengelolaan desa wisata pandanrejo menuju desapreneur*. 20(November). <https://doi.org/10.36275/mws>
- Nurjaya, N., Affandi, A., Ilham, D., Jasmani, J., & Sunarsi, D. (2021). Pengaruh Kompetensi Sumber Daya Manusia Dan Kemampuan Pemanfaatan Teknologi Terhadap Kinerja Aparatur Desa Pada Kantor Kepala Desa Di Kabupaten Gunungkidul, Yogyakarta. *JENIUS (Jurnal Ilmiah Manajemen Sumber Daya Manusia)*, 4(3), 332. <https://doi.org/10.32493/jjsdm.v4i3.10460>
- Purwanto, E. A. (2019). Kebijakan Publik Yang Agile Dan Inovatif Dalam Memenangkan Persaingan Di Era Vuca (Volatile, Uncertain, Complex and Ambiguous). *Molecules*, 9(1), 148–162. <http://jurnal.globalhealthsciencegroup.com/index.php/JPPP/article/download/83/65%0Ahttp://www.embase.com/search/results?subaction=viewrecord&from=export&id=L603546864%5Cnhttp://dx.doi.org/10.1155/2015/420723%0Ahttp://link.springer.com/10.1007/978-3-319-76>
- Puspitasari, 2015. (n.d.). *Wirausaha Muda Membangun Desa : Dinamika Partisipasi Pembangunan Desa*. 4(2), 330–341.
- Rokim. (2019). Analisis Kebijakan Versi Dunn & Implementasinya dalam Pendidikan Islam. *Jurnal Studi Islam*, 14(2), 60–69.
- Samaun, R., Bakri, B., & Mediansyah, A. R. (2021). Upaya Pemerintah Desa Mendorong Partisipasi Masyarakat Dalam Pembangunan Desa Oluhuta Kecamatan Atinggola Kabupaten Gorontalo Utara. *Hulondalo Jurnal Ilmu Pemerintahan Dan Ilmu Komunikasi*, 1, 18–33.
- Seran, G. L., Subiyanto, D., & Kurniawan, I. S. (2021). Effect of Organizational Commitment, Compensation and Job Satisfaction on Employee Performance Through Organizational Citizenship Behavior In Bank BPK DIY Employees Senopati Branch Office. *Bina Bangsa International Journal of Business and Management*, 1(1), 39–50. <https://doi.org/10.46306/bbijbm.v1i1.4>
- Sudirman Dkk., 2022. (2022). *Makanan Khas Lombok (Kare-Kare) Masyarakat Di Desa*. 1(2), 66–69. <https://doi.org/10.29303/jpimi.v1i2.1481>

Triyo, E., Haryono, & Irwantoro. (2020). Strategi inovasi badan usaha milik desa (BUM Desa) dalam meningkatkan potensi dan kesejahteraan ekonomi masyarakat desa (Studi pada BUM Desa Mandiri, Desa Morobakung, Kecamatan Manyar, Kabupaten Gresik) 1Ely. *Cakrawala Journal*, 14(2), 172–182. <https://doi.org/10.32781/cakrawala.v14i2.353>

William N. Dunn. (2003). *William-N.-Dunn-Pengantar-Analisis-Kebijakan-Publik-Gadjah-Mada-University-Press-2003_compressed-1.pdf* (p. 710).

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2014 Desa. 15 Januari 2014. Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7. Jakarta.

Peraturan Gubernur Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 20 Tahun 2020 *Petunjuk Teknis Pengembangan Desa Preneur*. 31 Mei 2022. Berita Daerah Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 20 Tahun 2022. Daerah Istimewa Yogyakarta.

LAMPIRAN BUKTI PENELITIAN



Dokumentasi bersama Bapak Erman selaku Lurah Karangawen. Foto diambil ketika peneliti melakukan wawancara bersama beliau



Dokumentasi bersama Bapak Hendie selaku Carik Karangawen. Foto diambil ketika peneliti melakukan wawancara bersama beliau



Dokumentasi bersama Bapak Sunarman selaku Danarta Karangawen. Foto diambil ketika peneliti melakukan wawancara bersama beliau



Dokumentasi bersama Bapak Deby selaku Tata Laksana Karangawen. Foto diambil ketika peneliti melakukan wawancara bersama beliau



Dokumentasi bersama Yuni Arianti sebagai pelaku UMKM di Kalurahan Karangawen



Dokumentasi bersama Bu Yanti dan Ibu Sarminah sebagai Tokoh Masyarakat sekaligus pelaku UMKM.



Dokumentasi bersama Bapak Susanto selaku Tokoh Masyarakat. Foto diambil ketika peneliti melakukan wawancara bersama beliau



Hasil Produk Olahan UMKM di Kalurahan Karangawen



KABUPATEN GUNUNGKIDUL
KAPANEWON GIRISUBO

PEMERINTAH KALURAHAN KARANGAWEN

ꦥꦶꦩꦶꦁꦏꦸꦁꦏꦶꦢꦸꦭꦏꦏꦤꦮꦺꦤ꧀ꦒꦶꦫꦶꦱꦸꦧꦺ

Jalan Wediombo km 7.5 Kepuh, Karangawen, Girisubo, Gunungkidul 55883
Telephone : (...)

Nomor : 100/247 Karangawen, 25 Juli 2023
Sifat : Biasa.
Lampiran : -
Hal : Keterangan Izin Penelitian.

Kepada Yth.
Direktur Program Studi Ilmu Pemerintahan
Sekolah Tinggi Pembangunan Masyarakat Desa (APMD) Yogyakarta
Di -
Yogyakarta.

Memenuhi surat saudara Prayuda Nomor : 569/I/U/2023 tanggal 25 Juli 2023 perihal sebagaimana tersebut pada pokok surat bersama ini kami sampaikan bahwa mahasiswa Program studi Ilmu Pemerintahan Sekolah Tinggi Pembangunan Masyarakat Desa (APMD) atas nama :

Nama : PRAYUDA
Nomor Mahasiswa : 17520285
Jenjang : S1
Program Studi : Ilmu Pemerintahan
Judul Skripsi : Peran Pemerintah Kalurahan Karangawen Kapanewon Girisubo Kabupaten Gunungkidul dalam mewujudkan Desa Preuner.

Dapat melakukan penelitian dalam rangka menyusun Skripsi dengan ketentuan mahasiswa Program studi Ilmu Pemerintahan Sekolah Tinggi Pembangunan Masyarakat Desa (APMD) yang akan melakukan penelitian tersebut agar dapat mengikuti peraturan tata tertib yang berlaku di Kalurahan Karangawen.

Demikian Keterangan ini dibuat dan atas kerjasamanya kami ucapkan terimakasih.



ERMAN SUSILO S.IP, M.IP